

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 116

TAHUN 2008

Transmisi ke Sektor Riil

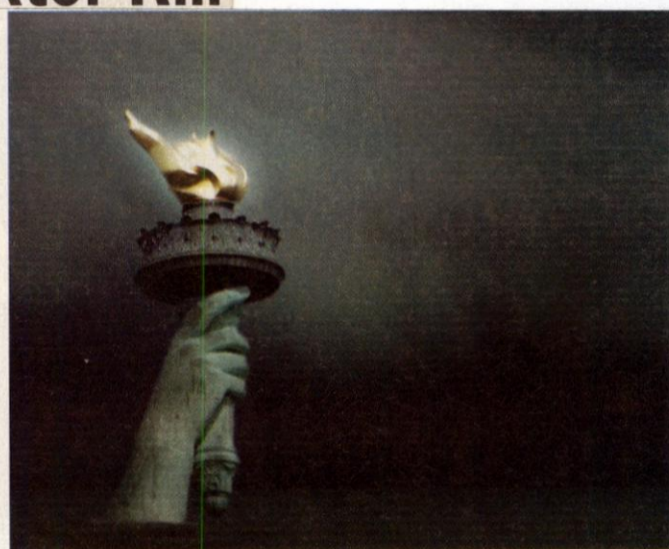
BARANGKALI tak ada negara di dunia yang bisa mengatakan dirinya "kebal" terhadap krisis keuangan global saat ini. Prospek ekonomi Amerika Serikat jelas jauh dari menjanjikan. Sebagian besar ekonom sepakat: resesi di Amerika tampaknya sudah tidak terelakkan. Pertumbuhan ekonomi Amerika diperkirakan akan negatif, setidaknya pada triwulan keempat 2008 dan pertama 2009. Paling cepat, baru pada triwulan kedua 2009 ekonomi Amerika akan mengalami pertumbuhan positif. Ada kemungkinan situasi itu akan berlangsung lebih lama.

Tampaknya, *credit crunch* (penghentian kredit) sulit dihindarkan. Akibatnya bisa diduga: sektor riil akan terpukul, investasi menurun. Di sisi lain, data *balance sheet* rumah tangga di Amerika menunjukkan kekayaan rumah tangga di negara itu, baik dalam bentuk aset keuangan maupun *real estate*, turun amat tajam, bahkan negatif. Selain itu, memburuknya *balance sheet* rumah tangga dapat membawa dampak pada kartu kredit. Padahal, di Amerika, pembiayaan utama konsumsi melalui kartu kredit. Akibatnya, konsumsi masyarakat (yang merupakan porsi terbesar dari produk domestik bruto Amerika, sekitar 71 persen, pada 2007) akan menurun.

Pertanyaan yang muncul: bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Dampak terhadap Indonesia akan muncul melalui dua jalur. Jalur pertama adalah *trade channel*. Pertumbuhan ekonomi Amerika akan mengalami kontraksi. Situasi *credit crunch* juga mulai menyentuh Eropa. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan lebih jauh. Apakah negara-negara Asia juga akan terkena? Selama ini, ada anggapan akan terjadi "*de coupling*"—pertumbuhan ekonomi di Asia tampaknya akan tetap kuat, walaupun Amerika dan Eropa melemah.

Saya termasuk yang meragukan argument *de coupling*. Saya kira, selama ini, ekonomi Asia memang bisa tetap bertumbuh karena integrasi jaringan produksi (*production network*) di antara negara-negara Asia amat kuat. Perdagangan intra-industri di Asia Timur membuat dampak kepada Asia masih relatif terbatas. Banyak negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, misalnya, mengekspor bahan mentah dan barang intermediasi ke Cina, Korea, dan Jepang, yang merupakan pusat-pusat jaringan produksi. Sehingga praktis dampak terhadap ekonomi Indonesia, setidaknya sampai triwulan kedua 2008, masih relatif terbatas.

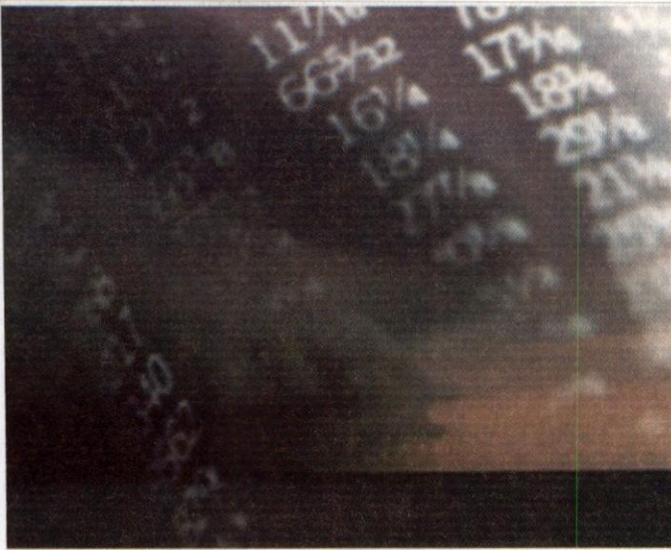
Namun jangan lupa bahwa pembeli akhir dari barang-barang yang dihasilkan oleh jaringan produksi di negara Asia adalah negara maju, termasuk Amerika dan negara-negara Eropa. Karena itu, jika Amerika dan Eropa melemah, tidak bisa tidak, dampaknya akan ditransmisikan ke negara-negara Asia. Dan karena negara Asia terintegrasi dalam jaringan produksi, dampak ini ke depan akan menjadi lebih cepat. Dampak dari *trade channel* terhadap Indonesia sebenarnya relatif terbatas. Penurunan



akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 0,3 persen. Tapi, yang perlu diperhatikan, perlambatan ekonomi di Amerika yang diikuti juga oleh penurunan harga akan berakibat pada melemahnya ekspor kita. Di sisi lain, pertumbuhan impor masih relatif kuat karena kebutuhan barang modal dan bahan baku akibat pertumbuhan ekonomi yang kuat sampai triwulan kedua 2008. Implikasinya, ada tekanan terhadap neraca transaksi berjalan (*current account*). Defisit dalam *current account*, jika tidak dapat ditutup oleh arus modal masuk di *capital account*, akan menimbulkan kekhawatiran bahwa neraca pembayaran kita akan terpengaruh—yang pada gilirannya akan mendorong pelemahan rupiah.

Dampak yang kedua adalah melalui *financial channel*. Dampak dari jalur keuangan ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan *trade channel*. Lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, di Amerika menghadapi persoalan besar dalam modal. Akibat kerugian dari kasus *subprime mortgage* yang kemudian berdampak pada kejatuhan pasar keuangan, lembaga keuangan di Amerika membutuhkan rekapitalisasi untuk mempertahankan *balance sheet*-nya. Implikasinya, lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan juga para investor akan menarik uangnya keluar dari berbagai negara di seluruh dunia, sehingga terjadilah kompetisi untuk mendapatkan modal.

Dalam situasi pasar keuangan yang tak pasti, yang dilakukan investor adalah memindahkan asetnya ke dalam bentuk investasi yang sampai saat ini dianggap paling aman, yaitu US T-Bills dan obligasi pemerintah Amerika. Akibatnya, likuiditas mengering, dan terjadilah kekurangan likuiditas, terutama dolar. Dan ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Amerika sendiri. Arus modal kemudian mengalir dari berbagai negara ke Amerika. Inilah yang kemudian menjelaskan mengapa sebagian besar



FHR

uang rupiah sampai saat ini sebenarnya masih relatif kecil dibanding Australia dan Korea Selatan, bahkan euro.

Pertanyaan yang jauh lebih spesifik: apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi dampak terhadap sektor riil di Indonesia?

Pertama, menjamin stabilitas sektor keuangan. Saya kira gerak cepat pemerintah dengan menyiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor keuangan adalah langkah tepat yang harus diacungi jempol. Dalam waktu yang relatif singkat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat diselesaikan. Pengalaman krisis 1998 mengajarkan, jika stabilitas sektor keuangan terganggu dan bank dilanda *rush*, praktis ekonomi akan lumpuh.

Upaya menjaga stabilitas sektor keuangan juga dibarengi dengan langkah Bank Indonesia mempermudah likuiditas. Ini sangat membantu mengurangi tekanan di perbankan. Memang ada berbagai kritik bahwa seolah-olah Bank Indonesia mendua dalam kebijakannya. Di satu sisi mempermudah likuiditas, tapi di sisi lain Bank Indonesia tetap menaikkan tingkat bunga. Apakah ini tidak kontradiktif?

Sebenarnya ada dua hal yang berbeda di sini. Manajemen likuiditas adalah sasaran jangka pendek. Bank Indonesia harus menjamin dan mempermudah likuiditas untuk menjaga agar perbankan tidak macet dan sektor riil tidak berguguran. Namun, dalam jangka menengah, Bank Indonesia juga harus memiliki jangkang bahwa inflasi terjaga. BI Rate adalah jangkang untuk jangka menengah. Tingkat bunga ini merupakan instrumen untuk mengelola ekspektasi inflasi ke depan. Ia akan memberikan arahan bahwa dengan tingkat bunga yang dinaikkan, inflasi pada tahun depan akan bisa dikendalikan dan berada di bawah 10 persen. Hal ini penting karena inflasi

yang tinggi akan mengurangi minat arus modal masuk ke obligasi dan juga untuk menjamin bahwa ekspektasi depresiasi tidak terus meningkat dan membawa tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Kedua, perlambatan ekspor saya kira akan semakin tajam pada triwulan pertama 2009. Penundaan order mulai terjadi dan juga pembatalan-pembatalan pembelian. Dengan situasi ini, mau tidak mau risiko dari ekspor akan meningkat. Krisis ekonomi 1998 mengajarkan, ketika risiko meningkat, akan timbul problema *agency cost*. Perbankan akan makin enggan menyalurkan kredit karena anggapan risiko yang tinggi. Dengan kata lain, terhambatnya penyaluran kredit lebih disebabkan oleh kondisi informasi yang tak simetris antara sektor produksi dan perbankan. Perbankan menganggap risiko di sektor riil masih tinggi.

Dalam situasi itu, perbankan harus memasukkan biaya risiko dalam tingkat bunga pinjamannya (Stiglitz-Weiss, 1981). Akibatnya, tingkat bunga pinjaman tetap tinggi, walaupun likuiditas ditambah. Informasi yang tak simetris memaksa perbankan menerapkan biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang tinggi. Akibat dari *agency cost problem* ini, kredit sulit mengalir walau Bank Indonesia sudah mempermudah likuiditas.

Lalu apa yang harus dilakukan? Di sini saya melihat pentingnya peran kredit biro untuk menjembatani informasi yang tak simetris antara bank dan sektor produksi. Kredit biro harus mampu membantu perbankan dalam memberikan informasi mengenai risiko dan rekam jejak debitor. Selain itu, peran asuransi ekspor menjadi penting. Lembaga ini dapat mengurangi *monitoring cost* dari perbankan. Yang jadi soal, permodalan asuransi ekspor harus diperkuat. Tanpa itu, risiko dan *agency cost problem* tak akan menurun.

Ketiga, dalam situasi ketika eksternal melambat, potensi pasar domestik menjadi amat penting. Sebenarnya, depresiasi rupiah dapat membantu ekspor. Namun, berbeda dengan 1998, situasi dunia justru jauh lebih buruk dari ekonomi kita, maka permintaan terhadap ekspor kita akan mengalami persoalan. Dalam kondisi ini, pasar domestik adalah solusi. Jangan dilupakan bahwa 65 persen produk domestik bruto kita adalah konsumsi rumah tangga. Karena itu, jika daya beli dapat dijaga, tekanan terhadap sektor riil juga akan menurun.

Antisipasi ini saya kira penting dilakukan. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang stabilitas sektor keuangan sudah lengkap, langkah pertama dalam mengantisipasi krisis keuangan global sudah dijalankan. Langkah berikutnya tentu antisipasi di sektor barang. Dengan ini mungkin kita akan menghadapi situasi yang tak pasti ini dengan lebih siap. Mungkin tak ada negara—termasuk kita—yang bisa mengatakan kebal terhadap krisis. Mungkin kita memang tidak lebih kuat dibanding 10 tahun lalu, tapi setidaknya kita lebih bijak dalam meminimalisasi dampaknya.

*) Direktur LPEM-FEUI

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL BATU BARA
 DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

Indikator Pekan Ini

UPAYA berbagai negara meredam gejolak pasar keuangan global mulai membuahkan hasil. Kepercayaan investor tumbuh. Selasa pelan lalu, indeks harga saham di sejumlah bursa dunia mulai merambat naik. Dow Jones Industrial Average di bursa Wall Street, Amerika, naik 11 persen. Indeks Nikkei di bursa Tokyo, Jepang, melonjak 14,2 persen. Dan di Jakarta, indeks Bursa Efek Indonesia naik hingga 94,1 poin.

Pulihnya kepercayaan investor dipicu oleh kesepakatan negara-negara Eropa mengucurkan dana 1,7 triliun euro (sekitar

Rp 22.100 triliun) untuk menyelamatkan bank-bank yang sakit. Investor juga menyambut baik rencana pemerintah Amerika untuk membeli saham Citigroup, Goldman Sachs, Well Fargo, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, State Street Corp, dan Bank of New York Mellon Corp. Nilainya mencapai US\$ 125 miliar atau sekitar Rp 1.212 triliun.

Nah, apakah Anda yakin kenaikan indeks harga saham di berbagai bursa dunia ini menandakan badai krisis finansial akan segera berlalu? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com.



HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

Tempo Interaktif: Online News From Indonesia
 Address <http://www.tempointeraktif.com/> Go



Krisis Amerika Berdampak Buruk

KRISIS ekonomi di Amerika Serikat menyebabkan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia anjlok dan nilai tukar rupiah jatuh hingga hampir Rp 10 ribu per dolar AS. Meski demikian, pemerintah yakin, tsunami ekonomi itu tak akan membuat Indonesia terpuruk seperti pada 1997-1998. "Insya Allah, tak akan terjadi," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin dua pekan lalu. Alasannya, dari data ekonomi dan politik yang dia pegang, tampak adanya perbedaan besar antara keadaan saat ini dan kondisi menjelang krisis monevter sepuluh tahun lalu.

Tapi banyak orang tetap khawatir. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, M.S. Hidayat, misalnya, mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil tindakan yang cepat dan tepat jika ingin terhindar dari keterpurukan yang lebih dalam.

Pada 8-15 Oktober lalu, *Tempo Interaktif* melakukan jajak pendapat tentang krisis ini. Ternyata, mayoritas responden tak sependapat dengan Presiden. Mereka yakin, krisis ekonomi Amerika akan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.

Menurut Anda, apakah krisis ekonomi Amerika Serikat akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi Indonesia?



Jawaban	Persentase	Jumlah Responden
Ya	81,46%	435
Tidak	15,36%	82
Tak Tahu	3,18%	17
Total	100%	534

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 125

TAHUN 2008



Sri Mulyani Indrawati:

Ditampar Dulu Biar Sadar

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi orang paling sibuk dalam pekan-pekan ini. Krisis ekonomi Amerika, yang memicu krisis global, berputar menikung sampai ke Indonesia. Bursa Jakarta jatuh ke level terburuk dalam tiga tahun terakhir, sehingga sempat ditutup. Padahal, pada krisis ekonomi 1998, bursa tak pernah tutup.

Perdagangan saham memang telah dibuka kembali pada Senin pekan lalu. Sebelumnya, pemerintah sudah menerbitkan sejumlah aturan pengaman bursa dan menyiapkan dana talangan untuk membeli saham badan usaha milik negara. Aksi ambil untung sepihak akan dikenai hu-

mendorong jatuhnya harga saham sedang diselidiki Kejaksaan Agung.

Di tengah situasi ekonomi yang genting, sebuah kabar duka melayang dari Semarang: Prof Dr Retno Sri Ningsih Satmoko tutup usia. Sri Mulyani hanya punya waktu beberapa jam untuk melayat ibundanya tercinta itu, sebelum kembali tenggelam dalam rapat maraton dengan sejumlah menteri dan pelaku bisnis di Jakarta.

Kamis pekan lalu, pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian berusia 46 tahun itu menerima Arif A. Kuswardono, Padjar Iswara, Grace S. Gandhi, dan Cornila Desyana dari *Tempo*. Di salah satu ruang di kantornya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, ia membeberkan sejumlah

langkah pemerintah untuk membuat pasar modal kembali teratur dan sektor riil tetap berdenyut.

Apakah tak ada peringatan dari masyarakat internasional kepada pemerintah Amerika terhadap bahayanya kredit macet properti?

Menurut sesama menteri keuangan di ASEAN, G-20, dan APEC, ada anggapan Amerika *underestimate*. Kita sudah beberapa kali mengekspresikan keprihatinan mengenai soal *subprime* ke Washington dan Bank Dunia. Kita menganggap Amerika bersama bank sentral dan menteri keuangannya secara mencolok tidak bisa melihat arah perkembangan masalah dari satu kasus bank atau asuransi bangkrut ke bangkrutnya sistem.

ge

Kejadian di Amerika sekarang persis dengan krisis yang terjadi di Indonesia pada 1998?

Persis kasus 1998, ketika kita mengumumkan penutupan 30 bank. Penutupan itu kemudian menciptakan persepsi bahwa semua bank tidak aman. Seluruh sistem menjadi dihukum. Kalau pemerintah Amerika membiarkan Lehman bangkrut, padahal dia termasuk empat besar perusahaan investasi rumah, artinya tidak satu pun yang dijamin aman. Ini jadi psikologi sosial: seluruh sistem tidak dipercaya. Isu tidak bisa dilokalisasi karena penanganan komunikasi politiknya tidak serius. Ada pula anggapan itu hanya masalah orang-orang kaya di Wall Street. Padahal, pekerja biasa saja tidak bisa mengambil uangnya karena banknya ditutup. Insting seperti ini yang membuat panik secara global. Tidak hanya Eropa yang kena imbas, tapi semuanya. Juga saham Asia yang selama ini jadi *the good performance*. Cina, yang ekonominya tumbuh 9 persen, sahamnya bisa jatuh sampai 40 persen.

Pemerintah menyebut ada aksi kriminal di balik jatuhnya bursa saham kita. Seperti apa bentuknya, dan siapa pelakunya?

Picu persoalan ini di luar Indonesia, yang di luar butuh *cash*, jadi dia jual. Ada orang yang menggunakan peluang ini untuk mendapat keuntungan. Seperti mengatakan tak punya barang, tapi menjual, dan ketika harga barang itu jatuh, dia membeli lagi. Ini psikologis sistemik, dia tinggal menghitung saja. Siapa yang memegang saham Telkom? Salah satunya Goldman Sachs. Dia butuh duit nggak? Dia pasti jual itu walau sebenarnya Telkom baik-baik saja. Kalau dia jual secara massif, pasti harganya jatuh. Kalau tadinya Rp 5.000, begitu jatuh ke Rp 3.000, dia beli. Praktek ini dalam suasana normal tidak apa-apa, tidak ada persepsi atau risiko sistemik. Sebab, pergerakan saham dalam situasi normal bisa acak, tergantung situasi ekonomi atau fundamental perusahaan itu. Tetapi, dalam situasi panik massal, tindakan itu membuat spiral ke bawah, semakin jatuh. Di banyak negara kini dilakukan koreksi terhadap praktek yang

memperburuk kondisi ini.

Apakah tindakan seperti itu tergolong kejahatan?

Kejahatannya jelas ada. Pertama, dia melakukan *short sell*. Kedua, dia tidak punya uang, atau hanya modal dengkul, dia hanya menggunakan permainan harga. Ketika menonton sepak bola, semua kan masuk dan keluar dari pintu masing-masing? Tapi, ketika ada yang *berantem*, orang akan berlari beramai-ramai. Yang duluan pasti dianggap lebih aman. Saking ingin duluan, kalau perlu dia harus menginjak orang untuk menyelamatkan diri.

Itu yang menjelaskan bursa kita bisa tutup hanya 86 menit setelah dibuka?

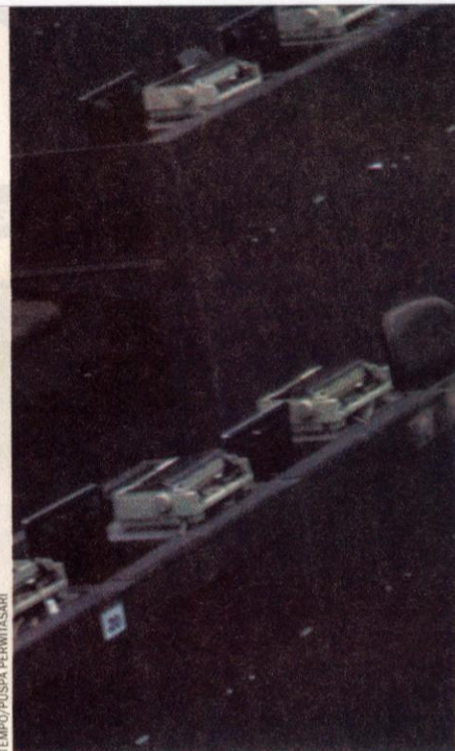
Karena tekanan dari Dow Jones dan lain-lain pada malam sebelumnya. Selisih waktu kita dengan New York 12 jam. Begitu Dow Jones tutup, kita baru buka, cuma kita telat satu jam. Jadi, bila di Singapura dan Hong Kong jatuh, tidak ada alasan untuk kita tidak jatuh. Sebenarnya, ada *benefit*-nya juga satu jam lebih lambat buka. Yang bisa membuat stadion itu aman sehingga orang keluar dengan tenang adalah keteraturan lagi. Semua orang dikembalikan stabilitasnya.

Apa persisnya alasan penutupan bursa?

Saya sudah bicara dengan para emiten, para broker, Bursa Efek Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal agar mereka melakukan *enforcement*, sebetulnya untuk mengembalikan order. Kita tahu bahwa sentimen sama sekali tidak bisa dihilangkan. Tetapi itu bisa diatasi kalau otak kita hanya 10 persen dipengaruhi histeria dan 90 persen rasional. Kalau kebalikannya, tidak bakal jalan. Itu yang terjadi.

Sekarang histeria sudah berkurang?

Yang sudah kita lakukan dalam dua minggu terakhir ini adalah, kalau Anda tidak perlu transaksi, ya jangan transaksi. Kalau Anda mau transaksi, saya akan bertanya dua-tiga kali dulu, betul-betul mau transaksi atau tidak? Harga sekarang juga bukan harga yang *fair* atau *equilibrium*. Kalau semua mau jual, nggak ada yang mau beli, kan sudah nggak *bener*? Kita berhenti dulu di tempat masing-masing, dan kemudian kita tata. Untuk hal ini perlu kewibawaan.



TEMPO/PUSPA PERWITASARI

Kalau pemerintahnya tidak kompeten dan tidak berwibawa, hilang semuanya. Anda lihat seperti Rusia, dia tidak dipercaya dan tutup sampai waktu yang tidak ditentukan.

Beberapa lama Indonesia bisa tahan menghadapi masalah ini?

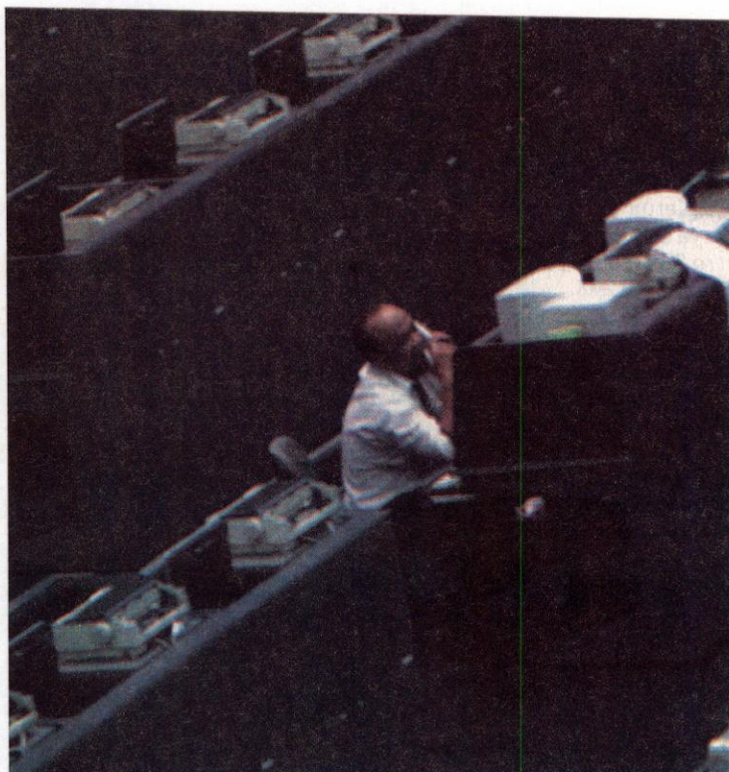
Psikologi dari pertanyaan ini kira-kira begini. Tangki kita isinya seratus liter. Nah, seratus liter itu kuat untuk jalan berapa lama? Konsep ekonomi tidak seperti itu. Tangki ini setiap saat bisa diisi, ada yang keluar, ada yang masuk. Pada saat kita jalan menghadapi krisis ini, setiap orang tetap memproduksi, bikin mobil, rumah, atau sepatu. Mereka yang punya pendapatan bisa tetap membeli. Minggu depan (pekan ini—*Red.*), saya akan fokus melihat sektor riilnya, melihat dari tiap industri, supaya tangkinya diisi terus. Memang jalannya sedikit demi sedikit. Kemarin mungkin perlu relaksasi. Kalau ada persoalan di bank, Bank Indonesia akan menolong dulu atau diberi likuiditas dan fasilitas kredit supaya tetap jalan. Tapi aktivitas ekonomi juga harus tetap jalan, sehingga penerimaan pajak tetap, bea cukai tetap, itu yang menjadi acuan kerja kita.

Bukankah penutupan bursa memakan biaya dan malah bisa membuat pasar bertambah panik?

Dalam situasi normal, tindakan ini dianggap *cost*, karena tidak efisien. Tapi, kalau masalahnya krisis, kita tidak membicarakan efisiensi dalam artian seperti itu. Seperti orang his-

DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tempat dan tanggal lahir Tanjungkarang, 26 Agustus 1962 Pendidikan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981-1986 • Master of Science of Policy Economics, PhD of Economics University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat, 1988-1992 Karier Pelaksana tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Juni 2008-sekarang • Menteri Keuangan, Desember 2005-sekarang • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Oktober 2004-Desember 2005. • Executive Director IMF mewakili 12 negara Asia Tenggara, 2002-2004 • Konsultan USAID di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, 2001-2002 • Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1990 sekarang



Seorang pialang bertransaksi saham pada pembukaan sesi pertama Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

teris: harus ditampar dulu biar sadar.

Rencana pemerintah membeli kembali saham dengan dana Rp 4 triliun apakah bisa menolong pasar?

Kalau sudah ditempeleng dan semuanya sudah rasional, kalau kamu tetap butuh likuiditas dengan menjual saham BUMN, kita tidak masalah. Kalau harga BUMN sudah terlalu murah, saya beli sendiri deh, karena seharusnya nilainya tidak seperti itu. Di perbankan *book value*-nya masih 1,5 sampai 2. Saya tidak hanya berbicara tentang BUMN, emiten-emiten besar juga saya undang. "Kalian kan punya perusahaan ini, kenapa tidak mau keluar dari tekanan seperti itu?" Saya rilekskan dengan *buyback*. Makanya sekarang mulai stabil.

Bagaimana jika emiten lain tak mau membeli saham perusahaannya sendiri?

Pemerintah akan memakai dana pemerintah sendiri. Tujuannya adalah rasionalitas terhadap pembentukan harga. Supaya orang tidak hanya ikut-ikutan, termasuk para pemegang saham minoritas, para ibu-ibu. Tapi kalau Anda jual sekarang, akan *bener-bener real life*, kok. Tahan saja dulu. Atau kalau benar-benar murah, beli saja dulu, sebentar lagi juga akan naik.

Dana talangan Rp 4 triliun itu akan dipakai sampai kapan?

Uangnya sudah ada di APBN. Jadi, kapan pun dibutuhkan, sudah siap.

Fokus pemerintah menyelamatkan pasar modal?

Sekarang pada tahap agar komunikasi politiknya tepat. Pengamat kan memberikan pengamatan berdasarkan berita koran atau harian. Ketika saya lagi menyelamatkan pasar modal, dikatakan pemerintah terlalu obsesif terhadap pasar modal. Ini *sequence* saja. Kalau pasar modal menimbulkan suatu hal, dan itu menular kepada perbankan, karena bank-bank yang memegang surat utang, surat utang pemerintah dan saham juga bisa jatuh. Kalau mereka jatuh, neraca mereka juga jatuh.

Setelah melakukan berbagai langkah, Anda yakin ke depan pasar akan lebih teratur?

Kemarin pasar modal sudah teratur, atau kita bikin lebih teratur. Kemudian bank, kita lihat dari sisi kewajiban dan asetnya. Asetnya kan memberikan kredit kepada orang? Nah, tagihannya masih lancar tidak? Kalau masih lancar, berarti perusahaan sektor riil masih jalan. Kalau dia kasih terlalu banyak, dana pihak ketiganya kurang, berarti ekspansinya harus dikurangi. Kalau dia terlalu banyak memberikan ke sektor properti, dan properti harganya turun, berarti dia kena risiko. Kalau dia masuk ke pertambangan, dan harga pertambangan juga turun, berarti dia juga kena risiko.

Lalu apa kebijakan untuk menolong sektor riil?

Kalau neraca bank sehat, dia bisa tetap memberikan pinjaman ke sektor riil. Sektor riil juga akan kita li-

hat. Sektor mana yang kemungkinan paling kena. Kalau harga komoditas, apakah harga pertanian, apakah gejolak pertambangan itu mempengaruhi neracanya. Juga yang menghasilkan *output* paling besar, seperti manufaktur dan konstruksi. Mereka banyak mengimpor material nggak?

Apa fasilitas yang disediakan untuk sektor riil?

Kebijakan sektor riil yang digunakan pemerintah untuk menjaga *growth* di atas enam persen. Kalau ada yang membutuhkan, dan sektor ini potensial, dan dia menyerap tenaga kerja, akan kita kasih fasilitas. Kalau butuh fasilitas untuk menambah kapasitas, kita tambah. Bila harga jatuh, diberi subsidi. Tapi kita tidak foya-foya. Kita akan mengalokasikan ke sektor yang betul-betul secara sosial politik membutuhkan *support* pemerintah. Berdasar konteks persoalan ekonomi kita, berarti neraca pembayaran menjadi penting. Bagaimana meningkatkan ekspor, mengontrol impor, dan memperbaiki *investment*.

Menurut perkiraan, krisis baru terasa di Indonesia tahun depan. Apa ada antisipasi penurunan ekspor dan tekanan impor serta naiknya nilai dolar?

Sebetulnya negara berkembang, terutama Asia, itu unik. Negara berkembang di seluruh dunia ditandai dengan negara yang membutuhkan *cash flow* lebih banyak. Karena itu, pengeluaran dalam bentuk asuransi, bayar utang, dan bayar bunga gede. Jadi, bila negara berkembang neraca keuangannya negatif, itu biasa. Bahkan dulu sebelum krisis Asia, kalau belum negatif 2,5 persen dari *gross domestic product* (GDP) itu biasa. Karena dia harus memastikan neraca modalnya surplus. Karena banyak orang yang akan menanam modal, jadi pertumbuhannya bisa 6-7-8-9 persen. Kalau investasi di Inggris cuma tumbuh satu persen. Nah, ekspor Asia bisa 150 persen dari GDP.

Penurunan ekspor Cina ke Amerika sebesar 8 persen. Apa benar sebagian dialihkan secara gelap ke Indonesia?

Cina memang harus membuang produksinya. Itu mengubah strategi pembangunannya, dan ini sulit untuk Cina. Masyarakat dalam negerinya juga harus membeli, jadi impor mereka bisa lebih banyak agar ada keseimbangan. Penyelundupan memang terjadi. Kita akan mencegahnya melalui bea cukai, industri, dan perdagangan. Kita akan bekerja sama dengan kamar dagang, sesuai dengan sektornya. Kalau ada yang salah, akan kita tindak. ■

gcf

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input checked="" type="radio"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 28-29		TAHUN 2008

Pasar Domestik

Ekspor Sepi, Lokal Terancam

Di saat pasar ekspor mulai seret, pasar domestik juga terancam barang murah asal Cina. Jika pemerintah bisa menghilangkan ekonomi biaya tinggi, produk Indonesia masih dapat bersaing.

Priyanto Sukandar, Tedy Gumilar, dan Teddy Unggik

BADAI itu mulai menyentuh sektor riil. Kemelut finansial di Amerika membuat pertumbuhan ekonomi negeri itu melambat dan permintaan mereka akan barang impor pun menurun. Kini, setidaknya sudah ada 17 prinsipal garmen asal Amerika Serikat yang memangkas order mereka dari Indonesia. Redma Gita, Direktur Eksekutif Indotextile (lembaga riset pertekstilan), menyebutkan, kalangan prinsipal yang sudah memangkas order itu meliputi sejumlah nama besar, seperti Nike, Levi's, dan Abercrombie & Fitch.

Redma juga menuturkan, penurunan order dari Amerika, tahun depan, bisa menyentuh level 6%. Di saat yang sama, para eksportir garmen juga belum bisa membuka pasar non-tradisional. "Membuka pasar ke Timur Tengah, misalnya, dalam

waktu singkat, tak gampang," ujar Redma.

Lampu kuning memang seolah sedang menyala di jalur ekspor. Untuk pertama kalinya, sejak beberapa tahun terakhir, neraca perdagangan kita mengalami defisit di bulan Juli 2008. Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), menerangkan, ekspor sepanjang Juli tercatat sebesar US\$ 12,55 miliar dan impor kita mencapai US\$ 12,82 miliar. Jadi, defisit itu tercatat US\$ 270 juta. Juni sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus sebesar US\$ 880 juta. Ekspor di bulan Juli juga tercatat mengalami penurunan 2,65% dibanding Juni.

Pasar domestik pun, kalau sudah begitu, kembali menjadi perhatian. Hanya saja, tak mudah bagi pemain lokal untuk *ujug-ujug* menguasai pasar domestik. So-

alnya, banyak produsen dalam negeri yang merasa bahwa kebijakan yang dibikin pemerintah acap membuat mereka babak belur di negerinya sendiri.

Masuknya barang-barang impor—terutama dari Cina—benar-benar membuat produsen lokal terpukul. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), merilis data, penguasaan produk lokal di pasar dalam negeri turun dari 74% pada tahun 2004 menjadi 22% di tahun 2007.

Padahal, saat ini, ancaman dari Cina (dan negara-negara lain juga) tentu akan semakin besar. Soalnya, Cina dan sejumlah negara lain seperti Vietnam dan Taiwan, selama ini pun mengandalkan Amerika sebagai tujuan ekspor mereka. Nah, ketika Amerika selesma begitu, maka negara-negara produsen itu pasti akan mencari pasar alternatif untuk digelontori produk-produknya. Indonesia jelas akan menjadi pasar yang menarik.

Djimanto, Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menegaskan, Taiwan, Vietnam, dan terutama Cina, tentu akan mengincar Indonesia karena punya poten-



Bambu dijumpai di sini. Kelak, boleh jadi semen buatan Cina juga akan mudah kita jumpai.

Agus Tjahajana Wirakusuma, Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian, mengatakan, produk semen di Cina diduga sudah kelebihan pasokan. Ketika Cina dan banyak negara lain terancam menyedot pembangunan infrastrukturnya lantaran krisis global, maka boleh jadi semen buatan Cina akan meluber ke mana-mana, terutama ke Indonesia. Tentu saja, secara resmi, akan sulit buat produk semen Cina masuk ke sini, karena mungkin mereka terhalang aturan standardisasi produk. Tapi, siapa juga paham, jalur perdagangan Indonesia-Cina justru lebih banyak dihuni oleh para pemain gelap yang suka menyelundupkan barang.

Untuk produk lain, Cina akan mengandalkan harga jualnya yang murah. Yosef Santo, pengurus Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia (Inaplas), menuturkan, produk alat rumah tangga asal Cina dijual dengan harga yang jauh lebih miring ketimbang buatan dalam negeri. Tak heran jika banyak konsumen melirik produk tersebut. Namun Yosef menegaskan, kualitas produk Cina sebenarnya tidak bagus.

PANGKAS BIAYA SILUMAN

Serbuan Cina juga dijumpai di produk baja. Sujono, Direktur Penjualan PT Gunung Garuda (produsen pelat baja), menuturkan, baja jenis lembaran baja panas atau *hot rolled coil* (HRC) dan lembaran baja dingin (*cold rolled coil/CRC*) buatan Cina, sejak enam bulan lalu, sudah menggerus pangsa pasar baja di dalam negeri.

Lagi-lagi, Sujono mengatakan, faktor harga yang lebih murah membuat produk baja Cina itu digemari konsumen.

Kejadian yang sama berulang dalam perdagangan produk lampu. Data Asosiasi Industri Perlampuan Listrik Indonesia (Aperlindo), menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juli tahun ini, produk lampu hemat energi (LHE) asing yang masuk ke Tanah Air telah mencapai 57 juta *pieces* (unit). Sebagian besar (90%) berasal dari Cina. Produsen lokal sendiri hanya mampu memproduksi 10 juta unit lampu. Bahkan, ada tiga produsen lampu di dalam negeri yang ditengarai sudah berniat "alih profesi" menjadi importir produk buatan Cina.

Di pasar sepatu, ceritanya agak berbeda. Asosiasi Pengusaha Industri Sepatu Indonesia (Aprisindo) merilis data, sekitar 60% sepatu untuk kalangan menengah ke bawah juga datang dari Cina. Tapi, di kelas menengah-atas, produk Cina ternyata tak bunyi. Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko, menuturkan, produk dalam negeri masih lebih diterima kalangan menengah-atas. Eddy juga mengatakan, ongkos produksi sepatu *sport* di Indonesia tergolong murah, hanya harga US\$ 4 hingga US\$ 8 per pasang.

Nah, ditambah dengan adanya hambatan tarif, maka sepatu asal Cina sebenarnya sulit bersaing di Indonesia. "Mereka enggak mungkin bisa memproduksi sepatu di bawah US\$ 4 per pasang," ujar Eddy.

Persoalannya, Djimanto menegaskan, banyak barang-barang ilegal asal Cina yang bisa membanjiri pasar dengan harga murah. Apalagi, mereka juga bisa saja melakukan praktik dumping.

Djimanto menegaskan pula, barang produksi Indonesia sebenarnya bisa dijual lebih murah ketimbang buatan Cina jika tak ada biaya siluman yang harus dikeluarkan pengusaha. Menurut Djimanto, jika ekonomi biaya tinggi ini bisa dipangkas oleh pemerintah, maka produsen lokal bisa *pede* ketika bersaing di pasar domestik.

Djimanto benar. Pemerintah harus serius menghapus ekonomi biaya tinggi ini. Apa gunanya Presiden menyerukan agar kita memilih produk dalam negeri jika produk tersebut kemahalan gara-gara ekonomi biaya tinggi? Apalagi, produk Cina juga sudah mendapat keringanan bea masuk gara-gara ada perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN-Cina, pada 2003, dan kerangka bilateral Indonesia-Cina pada tahun 2004. □

si pasar yang besar. Perilaku konsumsi orang Indonesia yang sensitif terhadap harga akan membuat produk asal Cina, Taiwan, dan Vietnam mendapat tempat di negeri ini. Maklum, barang-barang buatan Cina, Taiwan atau Vietnam memang sangat murah—kendati kualitasnya meragukan.

Saat ini produk asal Cina, Taiwan, dan Vietnam yang banyak beredar di pasaran dalam negeri meliputi produk elektronik, peralatan rumah tangga, tekstil, dan makanan. Produk Cina bahkan telah merambah pula ke sektor infrastruktur. Banyak mesin dan pelat baja buatan Negeri Tirai

Neraca Perdagangan Indonesia-Cina Tahun 2003-2007 (US\$ juta)

Uraian	2003	2004	2005	2006	2007	Trend (%) 2003-2007
Ekspor	3.802,5	4.604,7	6.662,4	8.343,6	9.675,5	27,92
- migas	985,8	1.167,3	2.702,6	2.877,0	3.011,4	36,83
- nonmigas	2.816,7	3.437,4	3.959,8	5.466,6	6.664,1	24,44
Impor	2.957,5	4.101,3	5.842,9	6.636,9	8.557,9	29,78
- migas	620,1	743,0	1.291,6	1.134,9	600,6	3,66
- nonmigas	2.337,3	3.358,3	4.551,3	5.502,0	7.957,3	34,23
Neraca	845,1	503,4	819,5	1.706,7	1.117,6	19,48
- migas	365,7	424,3	1.411,0	1.742,0	2.410,8	67,94
- nonmigas	479,4	79,1	-591,5	-35,4	-1.293,2	-
Total Perdagangan	6.760,0	8.706,1	12.505,2	14.980,5	18.233,4	28,75
- migas	1.605,9	1.910,3	3.994,2	4.011,9	3.612,0	26,66
- nonmigas	5.154,1	6.795,7	8.511,0	10.968,6	14.621,4	29,23

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 58-59

TAHUN 2008

Sang Naga pun Letoi

Dampak krisis global telah merasuk hingga ke Cina. Negeri dengan pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa tertinggi di dunia itu tak berdaya menanggung akibat dari krisis finansial di AS dan Eropa. Ekspor dan impor Cina pun melesu.

A. Reza Rohadian

DALAM tingkat pertumbuhan ekonomi maupun cadangan devisa boleh saja Cina jauh melampaui kekuatan ekonomi dunia lainnya. Tapi, terlalu berharap negeri 1,3 miliar penduduk yang tahun lalu dinobatkan Bank Dunia sebagai kekuatan ekonomi nomor tiga di dunia itu mampu meno-

pang dunia dari krisis global, agaknya juga berlebihan.

Bagaimana tidak? Selain nilai mata uang yuan yang selama dua bulan ini melemah terhadap dolar AS, sejumlah indikator perekonomian negeri itu juga anjlok terkena dampak krisis global. Seiring me-

nurunnya perekonomian AS dan Eropa, nilai ekspor Cina yang selama ini memberi kontribusi 20% terhadap pertumbuhan pun menukik. Hal itu juga terjadi pada sektor properti.

Betul, tahun depan pertumbuhan Cina diperkirakan masih di kisaran 9%, lalu jumlah cadangan devisa yang baru saja diumumkan naik menjadi US\$ 1,906 triliun dari US\$ 1,809 triliun pada akhir Juni 2008. *Tob*, hal itu tak kuasa menutupi rasa pesimistis para pelaku ekonomi di Negeri Tirai Bambu. Bukan apa-apa, laju peningkatan cadangan itu tak lagi sekecang tahun-tahun sebelumnya, saat perdagangan dan investasi perusahaan asing ramai-ramai masuk ke Cina.

Pantas, jika banyak pengusaha di Cina yang saat ini pusing tujuh keliling. Menjelang dibukanya Canton Fair, pameran ekspor terbesar Cina, Rabu pekan lalu, seorang manajer di Shunde Xiongfeng Electric Industrial yang hanya bersedia menyebutkan nama depannya, Zeng, mengkhawatirkan modal kliennya di mancanegara. Jika itu terjadi, ia yakin, satu per satu kliennya akan bangkrut. "Itu jelas sangat buruk bagi kami," katanya seperti dikutip *Associated Press*.

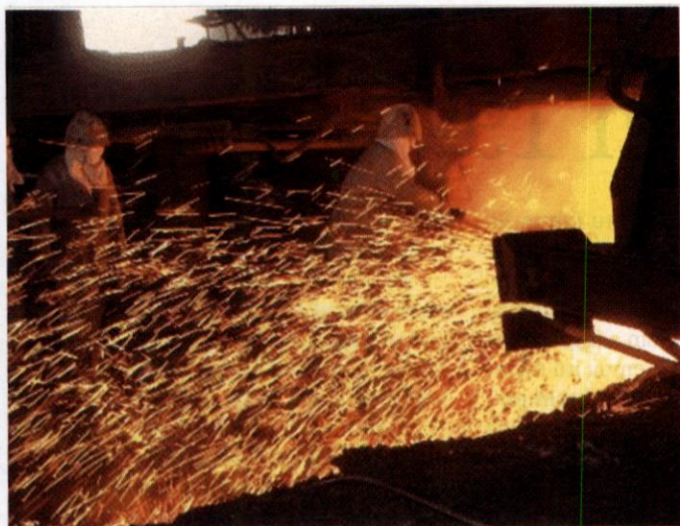
Perusahaan tempat Zeng mencari nafkah, tahun lalu sukses menjual 6 juta kipas angin listrik. Tapi, tahun ini permintaan terhadap pabrik di Shunde, dekat Hong Kong, yang mempekerjakan 5.000 karyawan itu dipastikan turun drastis.

Tentu bukan hanya Shunde yang menghadapi masalah itu. Selama ini Cina dikenal se-



CANTON FAIR. ANIMO PELANGGAN DAN PENGUSAHA BERKURANG

NATHANUPPATZ.COM



PABRIK BAJA CINA. IMPOR MELEMAH

bagai pembuat segala macam komoditi ekspor, mulai dari kaus oblong sampai mainan anak-anak. Bersamaan dengan turunnya permintaan dari mancanegara dan ketatnya kredit dari bank pemerintah, masa depan industri-industri itu pun suram.

Menurut Asosiasi Peralatan Elektronik Rumah Tangga Cina, Juli silam, ekspor kipas angin listrik Cina, telah anjlok 21% dari periode yang sama tahun 2007. Sebuah survei yang dilakukan bulan lalu oleh bank sentral menunjukkan permintaan ekspor ke pabrik-pabrik di Cina telah mencapai titik terendah sejak tahun 2005. Asal tahu saja, salah satu pabrik garmen terbesar di Cina, yakni Zhejiang Jianglong Textile Printing and Dyeing telah gulung tikar dua pekan lalu.

Melambatnya ekspor Cina, jelas juga mengurangi permintaan negeri itu akan bahan mentah, barang setengah jadi, macam bijih besi dari Australia dan peralatan pabrik dari AS, Eropa, dan Jepang. Tahun lalu, bahan mentah yang digunakan untuk pembuatan barang ekspor itu mencapai hampir setengah dari nilai impor Cina yang mencapai US\$ 1 triliun. "Dalam enam bulan ke depan, saya kira impor Cina akan melemah," kata Tao Wang, ekonom UBS di Beijing.

Ekonom senior Bank Dunia di Beijing, Louis Kuijs, memang masih percaya pertumbuhan Cina tetap tinggi. Sayangnya, kendati angka pertumbuhan itu cukup membantu ekonomi dunia, menurutnya, "Kekuatan ekonomi Cina tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan dunia."



PABRIK ELEKTRONIK CINA. ANJLOK HINGGA 21 PERSEN

Atas kekhawatiran itu, tak heran jika para pelanggan maupun pengusaha tak begitu antusias menyambut penyelenggaraan Canton Fair. Philip Richardson, pengusaha pembuat *speaker* stereo mewah di Guangzhou mengungkapkan order dari AS sudah lebih dari dua minggu ini turun. "Ketika mereka melihat pasar terus turun, mereka langsung stop berbelanja," sahatnya.

PASAR DOMESTIK PUN PUNYA ANDIL

Para pelanggan juga telah membatalkan rapat dengan Richardson yang sedianya akan bertemu dengan mereka di pameran perdagangan Hong Kong pekan ini. Dalam dua pekan terakhir, 9 dari 12 peritel yang mengunjungi pabriknya telah hengkang. Sudah begitu, di saat ia berupaya mempertahankan usahanya, datang kabar tak sedap dari pengusaha Cina yang mengerjakan stereo kabinetnya. Sang pengusaha lokal yang sudah kehilangan banyak order itu bilang sudah tak mampu membayar pegawainya. Untuk itu, ia meminta Richardson membayar lebih awal pesannya untuk bulan depan. Bagaimana Richardson tidak puyeng?

Menurut data Bea Cukai Cina, ekspor negeri itu hanya mencapai 5% dari perekonomian Cina. Tapi, seperti sudah disebutkan, nilai ekspor itu memberi kontribusi sebesar 20% bagi pertumbuhan Cina.

Tianjin Excellent Import & Export yang berlokasi di sebelah tenggara Beijing memperkirakan penjualannya bakal drop setengahnya dari perolehan tahun lalu

yang mencapai US\$ 50 juta. Guna meminimalisasi kerugian, perusahaan yang berancang-ancang mem-PHK 100 orang karyawannya itu berusaha menggenjot penjualan ke Jepang dan negara-negara di luar Eropa dan AS. "Kami tak punya strategi yang lebih baik lagi untuk mempertahankan bisnis," tutur seorang manajer perusahaan itu yang hanya bersedia memberi nama belakangnya, Yang. "Untuk melakukan ekspor senilai US\$ 1 juta, kami mempekerjakan 50 orang. Hitung sendiri berapa tenaga yang digunakan jika ekspor anjlok menjadi US\$ 10 ribu."

Sebenarnya, bukan cuma pasar luar negeri yang membuat industri Cina setengah lumpuh. Pasar domestik juga mempunyai andil terhadap melemahnya industri. Menurut penelitian biro riset J.D. Power and Associates, konsumen tak lagi mampu berbelanja barang-barang mahal. Akibat dari menurunnya daya beli masyarakat Tiongkok, produsen kendaraan roda empat asal Amerika Utara maupun Eropa yang menggantungkan penjualannya ke Cina terpaksa gigit jari. Sebagai contoh, penjualan Ford Motor Co. di Cina, Agustus lalu sudah menukik 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lantas Volkswagen dan General Motor Corp., masing-masing turun 20% dan 16%.

Sedangkan akibat dari letainya industri properti menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap baja. Empat raksasa industri baja di Cina terpaksa memangkas produksinya sebesar 20%. Ujung-ujungnya, ya itu tadi, permintaan bijih besi pun menurun tajam. □

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANKGET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2008

**BUY BACK SAHAM BUMN
TIDAK TEPAT**

Kebijakan pemerintah melakukan *buy back* saham BUMN terkait krisis keuangan global patut dipertanyakan. *Buy back* ini menggunakan dana Rp 4 triliun yang diambil dari APBN. Padahal, dana sebesar itu sedianya diperuntukkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur strategis.

Dis-alokasi dana APBN itu membuktikan bahwa pemerintah tidak mengerti bagaimana menangani dampak krisis global yang menyerang perekonomian Indonesia. Seyogianya, *buy back* itu dilakukan tidak menggunakan dana infrastruktur. Sebab, hal ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada penguatan ekonomi di sektor riil dan informal yang lebih membutuhkan dana untuk percepatan pembangunan. Selain itu, juga untuk pembukaan lapangan kerja baru yang dibutuhkan rakyat.

Dengan begitu, langkah pemerintah tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Masalahnya, jika nilai saham BUMN terus melorot pasca dilakukannya *buy back*, pada akhirnya pemerintah harus menjual kembali dengan harga yang lebih rendah. Nah, selisih antara harga beli dan harga jual itu, dapat dikategorikan sebagai kerugian

keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Sedangkan sikap pemerintah yang ngotot menggunakan dana infrastruktur untuk melakukan *buy back* dengan mengabaikan fakta tidak menentunya kondisi pasar, dapat dikategorikan sebagai pemenuhan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 UU TPK.

Ilusi terjadinya "rebound" di Bursa Efek Indonesia yang otomatis akan menguntungkan BUMN yang melakukan *buy back*, tampaknya, jauh dari kenyataan. IHSG beberapa hari lalu sempat naik karena adanya aksi *buy back* BUMN oleh pemerintah, kini kembali menurun. Dengan, situasi pasar internasional yang kembali memburuk, membuat kemungkinan terjadinya *rebound* di bursa kita semakin mengecil. Justru sebaliknya, IHSG diprediksi akan terus menurun untuk jangka waktu lama. Pada krisis ekonomi 1998 yang

berskala regional saja, *rebound* di bursa saham kita baru terjadi setelah dua tahun. Padahal, saat ini, krisis yang terjadi adalah krisis global yang justru bermula dan berpusat di bursa-bursa penting dunia. Masalah akan lebih buruk, jika pada kuartal keempat tahun ini, pemerintah tak mampu membayar utang luar negeri atau tak memiliki dana untuk membangun infrastruktur darurat (jika terjadi bencana alam). Maka, skenario yang mungkin terjadi, pemerintah akan menjual kembali saham yang telah di-*buy back* dengan harga yang lebih rendah.

Berkaitan dengan masalah itu, seyogianya pemerintah melakukan uniliberalisasi sektor keuangan agar dividen dan modal yang masuk ke Indonesia tidak keluar. Pemerintah juga harus fokus pada penguatan sektor riil dan informal untuk memperkuat perekonomian nasional.

Arief Poyuono

Ketua Presidium Federasi Serikat
Pekerja BUMN Bersatu

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2008

KRISIS KEUANGAN

Jepang Ajak Negara Berkembang Ikut KTT

TOKYO (Suara Karya): Pemerintah Jepang, selaku pemimpin negara-negara kelompok delapan (G-8), berjanji akan mengikutsertakan negara berkembang dalam pertemuan darurat yang membahas tentang perubahan sistem finansial dunia.

"Ini bukan hanya merupakan problem bagi negara-negara Kelompok Delapan saja, tapi sudah menjadi masalah internasional. Jadi negara berkembang juga harus diajak untuk membicarakan masalah ini," kata Chief Sekretaris Kabinet Takeo Kaawamura, juru bicara pemerintah, kepada pers.

Dia mengatakan G-8 sedang mempermasalahkan apakah pertemuan puncak itu hanya akan meliputi kekuatan ekonomi sedang tumbuh saja seperti Brazil, China dan India atau apakah mengundang seluruh negara berkembang.

Kawamura mengatakan bahwa Jepang berharap memainkan peranan penting dalam KTT sebagai pemimpin G-8. "Hanya Jepang yang mempunyai pengalaman dalam krisis finansial. Kami mempunyai pengalaman sangat berharga," kata Kawamura, menunjuk pada kolapsnya sistem finansial Jepang pada

akhir 1990.

"Itu merupakan hal wajar bagi Jepang sebagai pimpinan G-8 memainkan peranan penting dalam penanganan bersama krisis tersebut. Kami dapat menawarkan suatu saran atau usulan yang bagus dan sekaligus berbagi pengalaman dengan negara lainnya," ucap dia.

Kelompok Delapan terdiri atas Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat.

Jepang mengundang para pemimpin 15 negara lainnya untuk pertemuan G8 yang dijadwalkan pada Juli di resort bagian utara

Toyako.

Pertemuan G8 diperluas untuk membahas mengenai perkembangan Afrika dan juga pemanasan global. Tetapi Jepang, merupakan satu-satunya negara Asia dalam G-8 yang telah menolak seruan untuk perpanjangan secara permanen klub elite tersebut.

Akhir pekan lalu, pertemuan antara para kepala negara Eropa dengan Presiden AS George W. Bush menyepakati agenda untuk melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keuangan Global yang akan diselenggarakan pada November mendatang.

(Bloomberg/Kentos)

99

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> KORAN KONTAN <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> NERACA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA	<input checked="" type="checkbox"/> SUARA KARYA <input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 16 TAHUN 2008		

KRISIS GLOBAL

Pemerintah Minta Dukungan Dunia Usaha

JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah mengaku tidak sanggup bekerja sendiri dalam menghadapi situasi perekonomian global yang masih guncang akibat krisis sektor keuangan di Amerika Serikat (AS).

Karena itu, pemerintah meminta dukungan dunia usaha agar turut menjaga kondisi perekonomian.

"Jika Kadin *it's really true friend* (benar-benar teman sejati), maka Kadin sudah seharusnya menampak isu-isu miring yang memperkeruh suasana," kata Plt Menko Perekonomian/Menkeu Sri Mulyani pada forum Rakornas Kadin Indonesia Bidang Publik, Perpajakan, Fiskal, dan Moneter di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani mengatakan, Kadin punya peran konstruktif memberi masukan tanpa menimbulkan masalah. "Kalau usaha menangani krisis hanya dari saya (pemerintah), itu tidak cukup. Negara ini terlalu besar kalau hanya dipegang satu Menko Perekonomian dan Menkeu.

Apalagi kedua portofolio itu dipegang oleh satu orang. Dalam situasi seperti ini, seluruh jaringan komunikasi dan koordinasi yang diperlukan akan kita kerahkan," katanya.

Menurut Sri Mulyani, rumor-rumor negatif tidak boleh dibiarkan menyebar dan menimbulkan sentimen negatif. Pemerintah sendiri, katanya, siap mengomunikasikan berbagai persoalan di dalam dan luar negeri.

Pemerintah juga menggelar pertemuan dengan agenda fokus pada sektor riil agar mampu mengantisipasi krisis global. "Setelah beberapa minggu pemerintah sibuk menangani pasar modal yang terkena imbas krisis keuangan global, kini giliran sektor riil menjadi perhatian utama," katanya.

Minggu ini pemerintah menggelar pertemuan dengan seluruh pelaku usaha sektor riil. Pertemuan antara lain membicarakan upaya memperkuat pasar dalam negeri, pemantapan ekspor, dan pengurangan impor.

"Setelah beberapa minggu pemerintah sibuk menangani pasar modal yang terkena imbas krisis keuangan global, kini giliran sektor riil menjadi perhatian utama."

Sri Mulyani
Plt Menko Perekonomian/Menkeu

"Untuk itu, Menko Perekonomian akan memanggil seluruh pelaku sektor riil dalam waktu satu-dua hari ke depan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat.

Sementara itu, sejumlah menteri dan pejabat terkait kemarin petang menggelar

rapat koordinasi yang membahas kebijakan sektor riil untuk mengantisipasi dampak krisis keuangan global. Rapat dihadiri Meneg BUMN Sofyan Djalil, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Pasrah Suzetta, Menakertrans Erman Suparno, Mendag Mari E Pangestu, Menperin Fahmi Idris, Gubernur BI Boediono, dan Dirut PLN Fahmi Mochtar.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan kebijakan lebih rinci terkait sektor riil. "Tentang sektor riil, kami bahas nanti. Formulasi lengkapnya kita lihat yang paling efektif," katanya.

Sri Mulyani juga menyebutkan, pemerintah akan menampung persoalan dari masing-masing sektor dan kemudian menetapkan respons yang akan diperlukan. "Apa pun, kita *open*. Yang penting kita lihat situasi mereka setelah perkembangan kondisi global saat ini. Kemudian kita lihat *policy* pemerintah yang lebih tepat dan efektif," katanya. (Indra)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA	<input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP <u>OKT</u> NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 <u>21</u> 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 11		TAHUN 2008

EDITORIAL

Bersama-sama Menjaga Kepentingan Nasional

LANGKAH pemerintah dan otoritas moneter mengamankan dan melindungi sektor keuangan dan sistem perbankan nasional merupakan keniscayaan, guna merespons dampak krisis finansial global yang bermuara di Amerika Serikat (AS). Sektor keuangan kita sudah menerima dampak krisis saat pengelola dana coba menyedot likuiditas dari pasar uang dalam negeri. Perlindungan itu sudah dilakukan dari berbagai sisi. Mengetatkan likuiditas, menaikkan BI Rate hingga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) sebagai payung Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Dalam konteks kepentingan dan keterlibatan publik, langkah paling menentukan adalah keberanian pemerintah menaikkan nilai penjaminan simpanan masyarakat dalam sistem perbankan kita, dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar.

Sektor keuangan dan sistem perbankan kita memang harus cepat-cepat dilindungi dari eksekusi krisis finansial. Kalau tidak bertindak cepat, kerusakan sektor keuangan dan sistem perbankan mungkin akan sangat sulit dihindari. Setelah penyedotan likuiditas oleh pengelola dana asing, serta melemahnya rupiah, sistem keuangan/perbankan kita sebenarnya hanya tinggal mengandalkan kepercayaan publik. Kalau pemerintah dan otoritas moneter tidak buru-buru menggugah kepercayaan masyarakat, sistem perbankan kita mungkin akan roboh. Karena itu, menjadi masuk akal jika perhatian lebih terfokus pada sektor keuangan dan sistem perbankan nasional.

Kinerja sektor riil kita memang sudah lama bermasalah. Namun, masalahnya bukan bersumber pada krisis finansial saat ini, melainkan karena kegagalan kita sendiri mewujudkan iklim berusaha yang kondusif. Faktor lainnya adalah lemahnya daya beli rakyat. Itu sebabnya, di tengah kesibukan merespons ancaman krisis finansial saat ini, sektor riil kurang mendapat perhatian. Sebaliknya, pengamanan dan perlindungan terhadap sektor keuangan dan sistem perbankan memaksa sektor riil untuk sementara ini mencari jalannya sendiri untuk bertahan. Maka, mereka yang berorientasi ekspor didorong menggarap pasar baru. Atau, kalau cerdas, memaksimalkan pemanfaatan ruang pasar dalam negeri yang begitu besar kendati masyarakatnya berdaya beli rendah.

Tidak berarti sektor riil tidak penting. Namun, pengamanan dan perlindungan terhadap sektor keuangan serta sistem perbankan saat ini jauh lebih penting dan strategis, karena mencakup hajat dan kepentingan seluruh elemen masyarakat. Membesarkan penjaminan simpanan masyarakat merupakan risiko yang tidak kecil, karena menjaga hak 98 persen nasabah bank. Karena itu, menjaga dan mengamankan sektor keuangan serta sistem perbankan nasional menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat. Sekadar menyegarkan ingatan, kita harus menghadapi masa-masa sulit di awal dasawarsa 2000-an, karena sistem perbankan kita rusak parah pada periode krisis moneter 1998. Kita tak ingin pengalaman buruk itu terulang.

Beralasan jika pemerintah mengaku tidak sanggup bekerja sendiri dalam menghadapi guncangan perekonomian global sekarang ini. Juga bisa dimengerti jika pemerintah minta dukungan dunia usaha untuk turut menjaga kondisi perekonomian agar tidak menimbulkan sentimen negatif. Adalah Plt Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang membuat imbauan itu. Sri Mulyani minta dunia usaha ikut menjaga suasana tetap kondusif di dalam negeri.

Menkeu minta para pengusaha tidak ikut-ikutan menyebar isu yang bisa mengganggu ketahanan ekonomi nasional. Sebaliknya, para pengusaha harus segera menetralkan isu-isu yang berpotensi meresahkan masyarakat. Tentu saja Menkeu pantas mengeluarkan imbauan seperti itu, karena para pengusahalah yang menjadi faktor utama dalam setiap isu ekonomi dan bisnis.***

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

Pemerintah Mulai Amankan Sektor Riil

JAKARTA (SINDO)—Pemerintah mulai membahas skema pengamanan sektor riil dari dampak krisis keuangan global. Skema tersebut diterjemahkan dalam tiga langkah pokok, yakni peningkatan daya saing dan menjaga akses pasar ekspor, mengamankan dan menstimulasi pasar domestik, serta mendorong peningkatan produksi dan pasokan dalam negeri.

Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, langkah pengamanan tersebut dibahas bersama antarinstansi terkait secara maraton dalam satu hingga dua pekan mendatang. Pelaku usaha dipersilakan memberikan masukan, khususnya tentang berbagai kemudahan dan fasilitas yang diperlukan untuk menjaga sektor yang berpotensi terimbas krisis global.

"Dalam satu hingga dua minggu ini saya akan fokus pada sektor riil. Fokus kita adalah bagaimana menyiapkan instrumen yang paling efektif dan dapat melayani kita semua," katanya di depan peserta Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Publik dan Perpajakan di Jakarta kemarin.

Acara itu dihadiri perwakilan Kadin daerah seluruh Indonesia dan sejumlah asosiasi pengusaha. Menurut Sri Mulyani, penerbitan tiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) telah melengkapi berbagai langkah antisipasi krisis di sektor keuangan.

sambungan dari hal 1

Meski penting, menurutnya, penerbitan tiga perppu itu tidak cukup untuk mengamankan perekonomian nasional lantaran bila krisis Amerika Serikat dan Eropa terus berlanjut, semua negara akan terimbas.

"Ini ujian yang paling sulit di seluruh negara, terutama Asia. Asia menjadi satu-satunya harapan dunia saat ini," ujarnya.

Sri Mulyani menuturkannya, secara lebih spesifik skema pengamanan akan dibahas dalam kelompok kerja. Dia mencontohkan, kelompok kerja peningkatan ekspor akan menentukan langkah lengkap dan teknis mengenai upaya meningkatkan ekspor. Dengan demikian, langkah-langkah terkait peningkatan ekspor mudah dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun pelaku usaha.

Seusai mengikuti acara Kadin, Sri Mulyani bersama menteri terkait menggelar rapat membahas skema pengamanan sektor riil di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta. Rapat itu dihadiri antara lain oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Fahmi Idris,

Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi.

"Menteri sektoral sudah paparkan antisipasi. Untuk orientasi ekspor dan penguatan pasar dalam negeri sudah dimunculkan respons-respons seperti insentif, subsidi, dan pengupahan. Untuk pengupahan akan dikeluarkan sesegera mungkin, kalau bisa besok (hari ini)," kata Sri Mulyani usai rapat.

Paskah Suzetta menjelaskan, terkait penyesuaian upah, pemerintah akan menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) yang melibatkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan pengupahan ini adalah salah satu bentuk program penguatan pasar domestik melalui peningkatan daya beli masyarakat. "Ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah," ujarnya.

Selain kebijakan pengupahan, menurut Paskah, de-

mi penguatan pasar domestik, pemerintah akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) tentang kewajiban masyarakat memakai produk dalam negeri. Kewajiban yang sama sudah diberlakukan terhadap instansi pemerintah melalui Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. "Kewajiban pemakaian produksi dalam negeri secara luas di masyarakat mungkin memerlukan inpres," katanya.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, Departemen Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Departemen Pertanian akan membentuk gugus tugas (*task force*) untuk mengawasi peredaran barang impor. BPOM mengawasi produk pangan, makanan olahan dan obat-obatan, sedangkan Depdag untuk produk non-makanan dan minuman. "Kemudian Deptan untuk bahan makanan," ujar Mari. Ketua gugus tugas pengawasan barang beredar itu akan dijabat Menteri Perdagangan.

Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin menjelaskan, salah satu tujuan pembentuk-

an gugus tugas itu adalah pengawasan lebih terarah dan serentak. "Saya melakukan pengawasan produk makanan dan minuman serta obat-obatan lokal dan impor secara propustisia," ujarnya.

Tax Amnesty

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat mengusulkan agar pemerintah memberikan pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap investor lokal yang memarkir dananya di luar negeri. Pengampunan ini disertai syarat investor tersebut harus menginvestasikan dananya di Indonesia. Langkah itu bertujuan untuk membantu likuiditas dalam sistem perekonomian nasional.

"Pasar modal sudah tidak bisa kita harapkan. Satu-satunya sekarang tinggal perbankan. Dalam situasi seperti ini jika kita golkan *tax amnesty*, banyak dana dari luar akan masuk ke Indonesia. Ini tentu bermanfaat," katanya.

Kadin juga meminta agar semua komoditas primer hasil pertanian dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN), kecuali untuk minyak sawit mentah (CPO) dan karet. Perlakuan berbeda diterapkan pada CPO dan karet agar pelaku usaha dalam negeri bisa mengklaim pajak masukan sehingga memicu perkembangan industri pengolahan berbasis kedua komoditas tersebut. "Kadin juga meminta pemerintah pusat serius menangani pungutan ilegal di daerah," katanya.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa memperkirakan tingkat kapasitas produksi dunia usaha akan terpankas sekitar 10-30% akibat krisis keuangan global. "Krisis ekonomi di AS dan Eropa akan mulai terasa pada Januari 2009, tetapi menjelang akhir 2008 sudah tampak ada penurunan order maupun permintaan," kata Erwin.

Dia menuturkannya, penurunan pendapatan industri bakal berbeda-beda tergantung sektor usahanya. Jika berorientasi ekspor akan turun sekitar 20-30%, sedangkan jika berorientasi domestik hanya tertekan sekitar 10-15%.

"Saat ini, tingkat utilitas sudah merosot menjadi sekitar 90% karena banyak rekanan yang membatalkan order," katanya.

(muhammad ma'ruf)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2008

Sektor Riil Tergantung Penyerapan Anggaran

BADAI krisis keuangan yang berembus kencang dari daratan Amerika Serikat (AS) dan menyapu pertumbuhan ekonomi global mulai mereda, namun tetap perlu diwaspadai. Tidak mustahil perekonomian AS yang sedang terpuruk itu bisa menimbulkan badai yang lebih dahsyat lagi. Memang, indeks bursa-bursa saham di berbagai belahan dunia—yang dalam sebulan terakhir terus merosot—kini mulai menggembirakan dengan pola pergerakan yang fluktuatif. Para petinggi negeri ini yang sempat pontang-panting menggelar rapat antisipasi dampak krisis keuangan mulai bisa bernafas lega.

Yang ditunggu-tunggu sekarang adalah implementasi dari 10 jurus strategi yang telah ditelurkan pemerintah dalam menghadang dampak krisis keuangan yang amat mengerikan itu. Hal itu terutama yang terkait langsung dengan pertumbuhan dan perkembangan pada sektor riil. Para pelaku sektor riil meyakini pengaruh dari krisis finansial tersebut akan menggerogoti perekonomian dunia dalam tiga bulan setelah krisis di AS meledak. Namun, bisa jadi prediksi itu terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan semula.

Kekhawatiran itu sangat beralasan. Tengok saja perkembangan terbaru yang terjadi di China. Pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu mulai terganggu. Kalau selama empat tahun terakhir ekonomi China terus berotot, bahkan menohok negara-negara maju yang lain, termasuk Jepang, secara perlahan tapi pasti mulai mengendur.



Tanpa krisis pun seharusnya penyerapan anggaran tidak boleh tersendat demi pertumbuhan sektor riil guna memperkuat ekonomi domestik.

Berdasarkan data terbaru yang dilansir Pemerintah China, pertumbuhan ekonomi sepanjang kuartal III 2008 mencatat pelemahan 1,1% dari 10,1% pada kuartal II menjadi 9%. Petinggi China mengakui pelambatan pertumbuhan ekonomi tersebut salah satu dampak langsung dari krisis keuangan global.

Nah, kalau China saja—yang kita paham betul bagaimana kekuatan ekonomi sektor riil mereka—mulai tergerus, bisa dibayangkan betapa dahsyat persoalan yang bakal dialami para pelaku ekonomi di bidang sektor riil di negeri ini, terutama yang bergerak di bidang ekspor. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memprediksi akibat krisis keuangan AS, potensi ekspor ke Negeri Paman Sam yang tercatat terbesar kedua setelah Jepang, bakal tertekan hingga 20% pada kuartal IV akhir tahun ini. Karena itu, pemerintah harus menjaga betul kinerja perbankan dengan memberikan berbagai kemudahan untuk tetap menyalurkan kredit kepada pengusaha, terutama yang bergerak di sektor perkebunan, infrastruktur, dan konsumsi. Di lain pihak, pelaku usaha di sektor riil juga diharapkan jangan terlalu cengeng. Di balik sebuah hambatan, selalu terselip peluang.

Hal yang kini menjadi pertanyaan, kapan peluang itu muncul? Jawabnya tidak ada yang tahu karena tidak bisa diprediksi kapan dampak krisis keuangan global itu bakal berakhir. Namun, sebuah angin segar telah diembuskan oleh pemerintah, yakni berusaha mempercepat penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diprioritaskan pada proyek-proyek infrastruktur. Penyerapan APBN hingga Oktober 2008 baru mencapai 50%. Padahal, tanpa krisis pun seharusnya penyerapan anggaran tidak boleh tersendat demi pertumbuhan sektor riil guna memperkuat ekonomi domestik.

Meski terhadap berbagai kendala, pemerintah tetap harus optimal agar APBN 2008 bisa terserap semaksimal mungkin. Selama ini pemerintah beralasan bahwa anggaran tak terserap sebagaimana yang diharapkan karena terganjal beberapa persoalan, di antaranya revisi APBN 2008 yang semula dijadwalkan rampung April ternyata melar hingga September 2008. Hambatan lainnya, permintaan eskalasi harga yang diwajibkan para kontraktor.

Masih dalam upaya mempercepat penyerapan anggaran, tahun depan pemerintah berencana merevisi Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam keppres itu juga diatur soal waktu tender antara 45 hari hingga dua bulan untuk sebuah proses tender, hal itu akan disederhanakan menjadi 20 hari kerja saja. Rencana ini adalah sebuah langkah positif sekaligus sebagai bukti kepedulian pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Hanya saja, mengapa mesti menunggu tahun depan untuk merevisi keppres tersebut, bukankah kini saat yang tepat guna menghadang laju kejatuhan sektor riil? Kenapa mesti ditunda kalau bisa dilakukan sekarang? Jangan menunggu sampai ada korban dulu. (*)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> KORAN KONTAN <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA	<input type="radio"/> SUARA KARYA <input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST																																												
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEP</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 4										TAHUN 2008																																			

Perkuat Sektor Riil

Imbas krisis keuangan global di Indonesia belum benar-benar reda. Imbas itu bisa kembali muncul kapan saja. Sejumlah langkah sudah dilakukan pemerintah, termasuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang mengatur Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Dalam Perppu No 4/2008 tentang JPSK itu diatur mekanisme bagi Bank Indonesia (BI) ataupun pemerintah untuk memberikan bantuan pada lembaga keuangan untuk menghindari krisis. Bantuan itu bisa berupa fasilitas pinjaman hingga suntikan modal. Sumber pendanaan pemerintah untuk pencegahan dan penanganan krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyerbitan surat berharga negara (SBN) atau tunai.

Untuk mencapai tujuan dari JPSK, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang didukung oleh sekretariat. KSSK menetapkan kebijakan dan langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis di sektor keuangan. KSSK yang nanti memutuskan apakah akan memberikan bantuan likuiditas, penyertaan modal sementara, dan penyelesaian bank yang sifatnya sistemik. Pengambilan keputusan dilakukan KSSK atau oleh pemerintah, bergantung pada lembaga yang memiliki krisis.

Mengamankan sekaligus menjaga kestabilan sektor keuangan, moneter, dan perbankan, kita yakini memang perlu mendapat prioritas demi meredam imbas krisis keuangan global. Dan jika melihat reaksi pasar yang mereda, cukup menggambarkan langkah-langkah yang sudah diambil sudah tepat. Sejauh ini sektor keuangan masih terjaga, sehingga tidak bobol dan merusak perekonomian secara keseluruhan.

Namun, kita juga perlu tetap berhati-hati, jangan sampai bantuan yang dicantumkan dalam JPSK justru menjadi 'bulan-bulanan' oknum tak bertanggung jawab, layaknya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis 1997/1998. Tak ada pilihan lain kecuali memperketat kriteria pengucuran dana bantuan tersebut, juga pengawasannya.

Terbitnya JPSK bisa dikatakan cukup menenangkan sektor keuangan kita, jika sewaktu-waktu kembali menghadapi imbasan krisis keuangan global, yang sampai saat ini belum benar-benar reda. Hanya saja, sektor keuangan jelas bukan segalanya. Ada sektor lain yang juga butuh 'perlindungan', yaitu sektor riil.

Perekonomian dunia diprediksi melambat, dan karenanya, permintaan pasar ekspor dunia akan menurun. Ini jelas akan membawa dampak bagi sektor riil di dalam negeri. Sektor riil jadi sulit melakukan ekspansi, yang ujung-ujungnya memicu bertambahnya pengangguran. Inilah yang perlu dicegah. Kita berharap tersedia tambahan ruang bagi sektor riil, khususnya usaha kecil dan menengah untuk tetap bisa berkembang.

Sektor keuangan, yang sudah lebih dulu dilindungi JPSK, sudah selayaknya mendukung perkembangan sektor riil. Perbankan harus lebih berperan memfasilitasi pendanaan bagi kegiatan usaha kecil dan menengah. Jangan sampai perbankan yang sudah terlebih dulu 'diamankan' justru tak berani mengucurkan pembiayaan dengan alasan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Sektor keuangan, kita yakin, mampu ikut membesarkan sektor riil. Jaring pengaman yang sudah disiapkan bagi sektor keuangan, mestinya bisa mendorong perbankan dan lembaga keuangan lain untuk lebih berperan mengawal dan memperkuat sektor riil sekaligus pasar domestik. Bila ini yang terjadi, kita bisa berharap fundamental ekonomi kuat menahan imbas guncangan global. ■

berkembang baik dan bahkan ada yang baru lahir. Contohnya Citilink, dulunya *second brand* Garuda Indonesia, lalu per 1 September 2008 *reoperate* dan akan *spin off*, terpisah secara mandiri dari induknya Garuda Indonesia, agar bisa lebih lincah bersaing dengan para kompetitor.

Ceruk pasar sempit

Ada juga maskapai yang khusus menerbangi ceruk pasar yang sempit cukup sukses. Susi Air dulunya hanya menerbangi wilayah Sumatra. Sekarang Susi Air sudah melebarkan sayap menerbangi rute kota-kota intra-Pulau Kalimantan. Maskapai ini awal berdirinya memang fenomenal, dari start sebagai angkutan misi kemanusiaan tsunami di Kepulauan Nias pada 2004, lama-kelamaan mulai merambah sebagai maskapai kecil yang menghubungkan kota-kota *3rd tier* di Pulau Jawa, terbang dari Halim Perdanakusuma, Jakarta ke Cilacap, Cirebon, dan mulai percaya diri merambah rute intra-Pulau Kalimantan.

Sebuah maskapai yang didirikan secara *stages* biasanya lebih bisa *sustainable* terhadap tekanan-tekanan makro ekonomi. Misalnya, harga avtur yang mahal sekalipun.

Pemda Kalimantan Tengah bahkan melakukan *joint operation* dengan Pelita Air dan melahirkan maskapai lokal baru dinamai Isen Mulang Air, mengkhususkan menerbangi semua kota intra-Pulau Kalimantan sejak ditinggalkan oleh Trigana Air yang kini tidak beroperasi lagi di Kalimantan dan Isen Mulang

Air mengisi kekosongan pasar yang ditinggalkan Trigana Air tersebut.

Memang pasar angkutan udara di Indonesia sungguh amat besar, apalagi pasar terbanyak tumbuh di kelas bawah menengah dengan prediksi trafik penumpang udara Indonesia tahun 2008 mencapai 40 juta orang serta omzet perputaran uang 60 triliun. Sungguh sebuah bisnis yang menjanjikan asal bisa dikelola secara baik, profesional dan *prudent*.

Yang patut diwaspadai adalah dalam waktu dekat Pemerintah Indonesia, khususnya pebisnis penerbangan Tanah Air harus bisa menerima kenyataan masuk dalam era globalisasi Internasional yang di dalamnya kita tidak bisa mencegah datangnya era *open sky policy*. Dalam waktu dekat kita memasuki AFTA (ASEAN Free Trade Agreement) tahun 2010, di mana saat ini saja beberapa maskapai LCC sudah menyerbu terbang ke Indonesia. Misal (Indonesia) Air Asia, Silk Air, Valu Air, Tiger Air, dan tentunya dalam waktu operator LCC ASEAN tersebut akan segera bersiap menyerbu ke Indonesia mengingat pasar angkutan udara Indonesia sangat besar dan menjanjikan.

Sebaiknya pemain operator penerbangan Indonesia tidak boleh lengah dan manja mengingat *open sky policy* adalah bagian risiko dari pergaulan global dunia. Yang paling masuk akal bagaimana pemain operator Indonesia bersikap profesional dalam menjalankan bisnis penerbangannya daripada berbisnis hanya mementingkan gengsi. ■

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2008



BANGUN SEKOLAH. Direktur Utama Pertamina Ari H. Soemarno (kiri) menerima secara simbolis hasil karya bhakti dari Pangkostrad Letjen TNI George Toisuta di Bekasi, kemarin. Bantuan tersebut dikucurkan lewat *Pertamina Foundation*.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 17

TAHUN 2008

Kadin Jangan Merongrong

Pemerintah Perlu Ciptakan Kebijakan yang Aplikatif

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah yang berwibawa akan menjadi aset penting saat menghadapi krisis keuangan dan pasar modal yang sempat melanda beberapa hari lalu. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia diharapkan tidak merongrong pemerintah dengan berbagai pernyataan mencekam.

Pernyataan yang tidak disertai data cenderung menjatuhkan kewibawaan pemerintah di mata pelaku pasar modal dan sektor riil. "Kewibawaan pemerintah adalah aset bersama saat krisis. Itu harus sama-sama dijaga," ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Senin (20/10) di Jakarta, saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal dan Moneter, Kepabeanaan dan Cukai.

Sikap Menkeu itu diungkapkan karena ada beberapa pemimpin Kadin Indonesia yang kerap mengeluarkan pernyataan yang meresahkan pelaku pasar modal dan sektor riil. "Pengusaha itu jangan jadi pengamat karena mereka itu sebenarnya menjadi *player* (pelaku) dalam perekonomian yang perlu diselamatkan dan berperan aktif," ujar Sri Mulyani.

Sebagai ilustrasi, saat ini, Korea Selatan terkena dampak terbesar akibat krisis keuangan dunia. Itu terlihat dari besarnya depresiasi mata uang won. Itu terjadi karena Korea Selatan ditekankan oleh rumor, antara lain impornya yang terlalu besar hingga pinjaman luar negerinya yang terlalu tinggi. Kewibawaan pemerintahnya tergerus.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal dan Moneter, Kepabeanaan dan Cukai Hariyadi B Sukamdani menuturkan, "Masukan Kadin sampai sekarang masih direspons pemerintah. Banyak orang memang mudah mengeluarkan pendapat atas nama Kadin, tanpa data akurat."

Dukung pertumbuhan

Atas dasar itu, para pengusaha diminta memberikan dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan memanfaatkan pasar dalam negeri

secara maksimal. Itu merupakan suatu keharusan karena Indonesia dan negara-negara di Asia merupakan satu-satunya harapan dunia yang bisa meredam melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Salah satu keunggulan Asia adalah ukuran pasarnya yang sangat besar.

"Pemerintah bersedia *open minded* (terbuka) dalam mendengarkan semua hal yang diperlukan pengusaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu. Itu termasuk pada masalah perubahan tarif dan perpajakan," ujar Sri Mulyani.

Dalam Rancangan APBN 2009, pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi di level 6 persen atau turun dari kesepakatan sebelumnya, yakni 6,3 persen. Target pertumbuhan 6 persen tersebut tergolong masih tinggi dibandingkan dengan ASEAN yang menetapkan di kisaran 4,9 persen.

Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Bambang Soesatyo mengatakan, upaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan pasar domestik adalah langkah strategis. Namun, untuk memuluskan usaha itu, pemerintah sebaiknya fokus pada kebijakan-kebijakan yang sungguh dapat dilaksanakan. (OIN/OSA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP **OKT** NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 **21** 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 1

TAHUN 2008

TLKM, PTBA, PGAS AUTO REJECTION KE ATAS

Harga Saham BUMN Menguat

Oleh Karidun Pardosi

JAKARTA – Mayoritas harga saham BUMN menguat pada penutupan perdagangan Senin (20/10) seiring sentimen positif pembelian kembali (*buyback*) dan kenaikan indeks regional.

Di samping itu, pelaku pasar mulai mencermati keluarnya hasil kinerja keuangan emiten per September 2008 yang diperkirakan cukup bagus. Sentimen positif lain yang turut memicu kenaikan indeks regional, termasuk indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin adalah mulai direalisikannya pembelian saham perusahaan-perusahaan bermasalah di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Berdasarkan data BEI, dari 14 perusahaan terbuka BUMN, tiga saham di antaranya terkena penolakan otomatis (*auto rejection*) ke bawah. Ketiganya meliputi PT

Kinerja Harga Saham BUMN 20 Oktober 2008

No	Emiten	Harga (Rp)		Perubahan	
		17 Okt 08	20 Okt 08	+/-	%
1	Perusahaan Gas Negara*	1.600	1.760	160	10,00%
2	Tambang Batu bara*	5.050	5.550	500	9,90%
3	Telekomunikasi*	6.200	6.800	600	9,68%
4	Jasa Marga	820	890	70	8,54%
5	Aneka Tambang	1.160	1.240	80	6,90%
6	Semen Gresik	2.300	2.450	150	6,52%
7	Timah Tbk	1.200	1.250	50	4,17%
8	Wijaya Karya	195	203	8	4,10%
9	Bank Rakyat Indonesia	3.750	3.850	100	2,67%
10	Bank Mandiri	1.875	1.910	35	1,87%
11	Kimia Farma Tbk	98	99	1	1,02%
12	Bank Negara Indonesia	600	590	-10	-1,67%
13	Adhi Karya	260	255	-5	-1,92%
14	Indofarma**	79	72	-7	-8,86%
	IHSG	1.399,424	1.426,938	27,514	1,97%
			Rata-rata		3,21%

* autoreject keatas
** autoreject ke bawah

Sumber: BEI diolah Investor Daily

Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) yang meningkat 9,68% dari Rp 6.200 menjadi Rp 6.800 per unit, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) melonjak 10% dari Rp 1.600 menjadi Rp 1.760, dan

PT Tambang Babutara Bukit Asam Tbk (PTBA) dari Rp 5.050 menjadi Rp 5.550 atau menguat 9,9%. (**Lihat Tabel**).

Agus dan Sofyan Basir menilai, neraca keuangan Bank Indover sebenarnya cukup bagus dan menguntungkan. Anak perusahaan BI itu hanya membutuhkan likuiditas secara sementara di tengah kondisi pengetatan likuiditas dunia. "Kalau diputuskan untuk ditutup, semua kewajiban yang ada di neraca harus diselesaikan. Jadi, kalau bisa dipertimbangkan ulang justru bisa membuat bank itu tidak menjadi kerugian bersama," kata Agus.

Sofyan Basir mengakui, BRI menempatkan dana di Indover berupa pinjaman an-bank dan sindikasi kredit. Namun, BRI telah membentuk pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang cukup atas eksposur tersebut. "Kalau ada suntikan dana ke bank itu pasti bisa kembali. Mudah-mudahan bisa terselesaikan, saya lihat arahnya akan ada penyelesaian," tandas dia.

Glen Glenardi juga berharap ada langkah penyelamatan terhadap Indover. Bila Pemerintah Belanda sampai melikuidasi bank itu, kredibilitas perbankan Indonesia akan terpengaruh buruk. "Bank-bank kita juga banyak melibatkan Indover untuk transaksi ekspor impor dan valas," kata dia.

Bank BNI juga mengakui adanya dana yang tersangkut di Indover. Namun, jumlahnya relatif kecil. "Hal itu tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap kinerja BNI. Dana yang di sana kecil sekali. Kami dan juga bank-bank lainnya dalam posisi menunggu apa yang akan dilakukan BI, selaku pemilik Bank Indover," ujar Intan Abdams Kato, sekretaris perusahaan BNI, ketika dihubungi *Investor Daily*, Senin (20/10).

Suara DPR

Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin Sofihara dan anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Andi Rahmat juga meminta BI menyelamatkan Bank Indover. Kelangsungan hidup Indover harus dipertahankan, karena dia satu-satunya bank Indonesia di luar negeri yang berbadan hukum Belanda. "Jadi, kehormatan betul buat BI," ujar Endin.

Menurut Endin, BI bisa menyelamatkan Bank Indover melalui suntikan modal, meskipun UU BI melarang bank sentral melakukan penyertaan modal kepada anak usaha yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi moneter BI. Syaratnya, BI sudah mengantungi izin DPR.

UU No 23/1999 Pasal 77 menyebutkan, BI tidak membolehkan melakukan penyertaan modal. "UU memang itu tidak bisa tanpa persetujuan DPR, kalau ada persetujuan DPR itu bisa," tutur dia.

Dalam rapat konsultasi kali ini, lanjut Endin, memang terjadi perdebatan soal keabsahan atas langkah suntikan modal BI untuk Bank Indover. "Yang tidak boleh itu *kan* penyertaan modal. Tapi, ini *kan* dalam rangka penyelamatan

Indover, bukan penyertaan. Artinya orang lagi sakit *kan* perlu diobati. Nanti kalau sudah sehat dijual lagi *nggak* jadi soal. Memang sampai akhir tahun ini BI dilarang untuk memiliki anak perusahaan," papar dia.

Tanpa upaya penyelamatan Indover, Endin khawatir, justru akan berdampak negatif bagi bank-bank nasional. Namun, BI harus menggunakan sumber dana anggaran BI dan tidak boleh berasal dari APBN. Pasalnya, BI memiliki alokasi dana khusus dalam pos cadangan tujuan. "Kalau diambil dari cadangan tujuan tidak akan mengganggu cadangan BI, tapi surplusnya akan berkurang. Cadangan tujuan hanya bisa dilakukan kalau BI surplus," kata dia.

Perbankan nasional menyelesaikan lambatnya penanganan kasus Indover, sehingga mengurangi kredibilitas perbankan nasional di dunia internasional. "Bank sekecil Indover saja tak bisa diselesaikan BI, bagaimana dengan nasib bank-bank kita yang ingin mencari pinjaman di luar negeri untuk kebutuhan valas dan transaksi *letter of credit* (L/C)," kata Andi Rahmat.

Tidak Signifikan

Dihubungi terpisah, analis perbankan dari Credit Suisse Mirza Adityaswara dan Ikhsan Binarto dari PT Optima Investama mengungkapkan, kinerja bank-bank nasional yang memiliki simpanan dana di Bank Indover tidak akan berpengaruh signifikan. Bank Indover sebenarnya merupakan lembaga keuangan swasta yang berbadan hukum Belanda, hanya saja dimiliki BI hingga 100%.

"Kondisi itulah yang menyebabkan bank-bank nasional percaya dan tertarik menempatkan dananya di Bank Indover, baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman," ujar Mirza.

Menurut Mirza, BI hendaknya segera memberikan jalan keluar untuk menyelamatkan dana-dana milik bank-bank nasional itu. Kendati pengaruhnya terhadap kinerja tidak terlalu signifikan, dana itu tetap diperlukan oleh bank-bank tersebut untuk mendukung peningkatan kinerjanya.

"Apalagi di tengahan hantaman krisis finansial global seperti saat ini. Kendati tidak berpengaruh signifikan, hal itu tetap bisa mengurangi laba. Jalan keluar harus segera dikeluarkan Bank Indonesia, bila perlu pemerintah," ujar Mirza.

Baik Mirza maupun Ikhsan mengatakan, kasus Bank Indover yang berimbas pada sejumlah bank nasional hanya menjadi salah satu penyebab turunnya sejumlah saham perbankan. Turunnya harga saham perbankan baru-baru ini lebih banyak dipengaruhi kondisi perekonomian regional dan global yang juga tengah terpukul. "Kasus Indover memang sempat terus menurunkan saham perbankan, terutama saham BNI, tapi itu hanya salah satu penyebab," kata dia. (ef/rav)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

Investor daily/ANTARA/ Ujang Zaelani/ama/08



Program Sosial Pertamina

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H Soemarno (dua dari kanan) bersama Pangkostrad Letjen George Toisuta dan Bupati Bekasi Sa'duddin berdialog dengan sejumlah siswa saat meninjau ruang kelas yang direnovasi di SD 02 Babelan, Bekasi, Jabar, Senin (20/10). Kegiatan tersebut dalam rangka program sosial peduli pendidikan kerja sama Pertamina, Kostrad dan Kompas Media Nusantara.

HUBUNGAN MASYARAKAT
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI
 UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2008

Upaya penyelamatan 'industri vital'

Oleh YUSUF WALUYO JATI
 Wartawan *Bisnis Indonesia*

Ibarat virus, krisis finansial di Amerika Serikat (AS) telah menjalar sedemikian cepat ke seluruh dunia.

Dahsyatnya krisis tersebut tak hanya merontokkan sektor keuangan global, tetapi juga mengancam ambruknya sektor riil global yang menjalin hubungan intim dengan pasar Negeri Paman Sam.

Malapetaka dari rapuhnya sistem neoliberalisme AS tersebut sontak ikut menyeret Indonesia masuk dalam pusaran krisis. Sektor keuangan nasional terguncang, sementara sektor riil yang sebagian besar ditopang oleh kinerja sektor manufaktur seperti berada di ujung tanduk.

Persentase produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha



Catatan: 1) Lainnya terdiri dari sektor listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah, dan jasa
 *) Semester I/2008

Sumber: BPS (2008), Depperin, diolah

BISNIS/AGUS TAUFIK

Menurut Dedi Mulyadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPi) Depperin, sejumlah bidang industri, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, keramik, pengolahan karet, logam, besi dan baja, makanan dan minuman, serta kelompok industri agrokimia termasuk hasil-hasil laut, selama ini berharap banyak pada pasar AS.

Tanda-tanda pelemahan pasar itu mulai dirasakan oleh sejumlah sektor, seperti industri pertekstilan. Betapa tidak, sedikitnya 17 prinsipal pakaian mulai memangkas order.

Sepanjang tahun ini, pemangkasan order pakaian jadi diperkirakan bisa mencapai 6% apabila inflasi di AS hingga akhir tahun ini

mencapai angka di atas 5% yang menghancurkan daya beli pasar domestik negara itu.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Hendra Lesmana bahkan mengungkapkan perusahaan manufaktur di hampir seluruh kawasan industri (KI) di Jawa mulai memangkas produksi sekitar 10%.

Keadaan ini sebenarnya mengindikasikan industri manufaktur nasional masih membutuhkan perlakuan khusus dan dukungan insentif fiskal dan nonfiskal.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M.S. Hidayat mengatakan saat ini menjaga kinerja ekspor melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi pasar dan produksi nasional harus diakselerasi dengan berbagai kebijakan yang mampu menekan biaya

tinggi sekaligus mempercepat proses birokrasi.

Dari sektor fiskal, Departemen Keuangan dengan cepat langsung melemparkan 'ban penyelamat'. Melalui Permenkeu No. 134/PMK.011/2008 pemerintah bersedia menanggung bea masuk (BM) atas impor barang dan bahan baku untuk proses produksi barang dan jasa kepada 11 sektor industri terpilih.

Ke-11 sektor industri yang ditanggung BM-nya mencakup usaha perbaikan pesawat terbang, galangan dan perbaikan kapal, jasa pelayaran, komponen otomotif, komponen elektronik, industri alat besar dan perakitan, industri botol infus, pengolahan susu, komponen PLTU, industri baja canai dingin, dan pembuatan sorbitol. (yusuf.waluyo@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

- KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI
 GEOLOGI

- UMUM
 PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2008

Mengamankan pasar domestik

Oleh M. ROCHMAD PURBOYO
Wartawan *Bisnis Indonesia* &
SEPUDIN ZUHRI
Kontributor *Bisnis Indonesia*

Krisis keuangan global yang awalnya melanda Amerika Serikat (AS) dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perdagangan dalam negeri Indonesia. Dengan lesunya perekonomian AS dan Eropa, permintaan barang, termasuk produk impor di negara itu, dipastikan akan turun.

Hal ini akan mengakibatkan eksportir dari negara lain (misalnya China yang perdagangan dengan AS mencapai US\$200 miliar) mencari alternatif pasar sebagai pengganti. Indonesia dengan penduduk lebih dari 200 juta jiwa, tentu menjadi incaran mereka. Apalagi tarif bea masuk di negara kita sangat rendah.

Berdasar World Trade Indicator (WTI) Bank Dunia, rata-rata tarif bea masuk di Indonesia hanya 7%, atau lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean dan Asia Pasifik lainnya yang rata-rata di atas 10%.

Tentu ini akan mengakibatkan banjirnya produk impor di negara kita. Di sisi lain, ekspor kita ke negara maju tersebut juga terganggu. Jika tidak segera diatasi, dipastikan surplus neraca perdagangan Indonesia akan tergerus dan terancam defisit.

Sebagai bahan perbandingan surplus periode Januari-Agustus 2008 sebesar US\$5,62 miliar, sedangkan periode yang sama tahun sebelumnya tercatat US\$26,53 miliar atau turun US\$20,91 miliar.

Dalam upaya mengamankan pasar dari ancaman serbuan barang impor, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan departemennya akan melakukan pengawasan barang beredar yang

Perkembangan ekspor-impor Indonesia (juta US\$)

	Juli	Agustus	Jan-Agus 07	Jan-Agus 08	% (Agt/Jul)
Ekspor	12.553,1	12.499,47	3.495,2	95.448,8	-0,43
Migas	2.874,4	2.937,1	13.401,3	21.905,2	2,18
Nonmigas	9.678,7	9.562,3	60.093,9	73.543,6	-1,2
Impor	12.815,2	11.864,2	-	89.828,5	-7,42
Migas	3.572,8	2.891,8	-	23.312,1	-19,06
Nonmigas	9.242,4	8.972,4	-	66.516,4	-2,92

Sumber: BPS, 2008

lebih difokuskan, terutama terhadap produk makanan dan minuman serta komoditas tekstil dan produk tekstil yang tingkat konsumsinya tinggi.

Untuk produk makanan, imbuhnya, semua produk yang masuk ke Indonesia harus ada nomor registrasi sehingga mudah mendeteksi kelegalan produknya.

Semua impor produk konsumsi juga akan diwajibkan melalui jalur merah saat pemeriksaan di Bea dan Cukai di pelabuhan, yang artinya semua produk akan diperiksa.

Menteri juga menegaskan beberapa ketentuan yang akan direvisi juga menyangkut enam parameter pengawasan, seperti penerapan standar nasional Indonesia (SNI) Wajib, penggunaan label berbahasa Indonesia, ketentuan purnajual, tata cara penjualan, iklan produk, dan klausul baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah juga akan memperkuat koordinasi Bea dan Cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional, dan Komite Antidumping Indonesia (KADI) secara teratur akan menyulitkan produk impor yang dialihkan karena tidak dapat masuk ke AS.

Untuk membatasi impor produk elektronik, Edy Putra Irawady, Deputi Bidang Koordinasi Distribusi dan Perdagangan Kementerian Koordinator Perekonomian,

mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan aturan yang hanya mengizinkan impor komoditas itu hanya dilakukan oleh importir produsen (IP). Selama ini, pelaku impor produk tersebut kebanyakan adalah importir terdaftar (IT).

Dalam mekanisme Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia juga memiliki instrumen pengamanan perdagangan, *safeguard* yang bisa diterapkan langsung apabila ada produk sejenis yang impornya meningkat secara drastis.

Namun, pemerintah memastikan tidak akan menggunakan mekanisme kenaikan tarif bea masuk untuk membatasi masuknya barang impor. Deputi Bidang Kerja sama Internasional Kementerian Koordinator Perekonomian Mahendra Siregar mengatakan kita tidak bisa begitu saja menaikkan bea masuk, mengingat telah terikat perjanjian kerja sama dengan negara mitra dagang.

Jika tarif itu dinaikkan, dikhawatirkan negara lain juga akan menaikkan tarif bea masuk terhadap produk ekspor Indonesia.

AS tetap favorit

Amerika Serikat tetap menjadi favorit produk ekspor Indonesia dan menduduki peringkat kedua pasar ekspor Indonesia dengan nilai sebesar US\$8,51 miliar untuk

periode Januari-Agustus 2008. Jepang menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar dengan nilai US\$9,19 miliar.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS dan Uni Eropa, mau tidak mau eksportir harus segera melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor, baik komoditas maupun pasar.

Sejumlah kesepakatan perdagangan bebas (*free trade agreement/FTA*) dengan mitra dagang, kata Dirjen Kerja sama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan Gusmardi Bustami, juga merupakan salah satu cara diversifikasi pasar.

Setelah penandatanganan kerja sama ekonomi (EPA) dengan Jepang, segera disusul kesepakatan FTA Asean dengan Australia dan Selandia Baru, dan FTA Asean dengan India.

Memang permasalahan utamanya adalah mampukah Indonesia bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan pasar tersebut? Inilah yang harus diperjuangkan pemerintah, baik melalui promosi ekspor yang efektif, maupun program peningkatan daya saing yang benar-benar bisa diimplementasikan.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mengatasi dampak perlambatan ekonomi global bagi eksportir. (rachmat.purboyo@bisnis.co.id)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

<ul style="list-style-type: none"> ● BISNIS INDONESIA ○ INVESTOR DAILY ○ KOMPAS ○ KORAN TEMPO ○ KORAN KONTAN ○ MEDIA INDONESIA ○ NERACA ○ PIKIRAN RAKYAT ○ RAKYAT MERDEKA ○ REPUBLIKA 	<ul style="list-style-type: none"> ○ SUARA KARYA ○ SEPUTAR INDONESIA ○ SUARA PEMBARUAN ○ SINAR HARAPAN ○ TABLOID KONTAN ○ THE JAKARTA POST ○ MAJALAH GATRA ○ MAJALAH TEMPO ○ MAJALAH TRUST 																																												
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS <input type="checkbox"/> ENERGI ALTERNATIF	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> GEOLOGI	<input checked="" type="checkbox"/> UMUM <input type="checkbox"/> PANSUS ANGKET																																											
<table border="1"> <tr> <td>JAN</td><td>FEB</td><td>MAR</td><td>APR</td><td>MEI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGST</td><td>SEP</td><td>OKT</td><td>NOV</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
HALAMAN: 2										TAHUN 2008																																			

Pemerintah antisipasi perlambatan sektor riil

BISNIS INDONESIA

JAKARTA : Pemerintah tengah membahas sejumlah upaya untuk menggerakkan sektor riil, dengan mempertimbangkan faktor perlambatan ekonomi global yang memengaruhi kinerja perekonomian nasional.

"Nanti kita lihat bentuknya apa yang paling efektif. Nanti kita tampung dari sektor-sektor itu apa-apa yang mereka jadikan daftar dari persoalan yang muncul karena adanya situasi ini dan apa respon kita," tegas Menteri Keuangan, sekaligus Plj Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati menuturkan usai rapat koordinasi antisipasi sektor riil, kemarin.

Sri Mulyani menjanjikan pemerintah akan memprioritaskan upaya penyelamatan sektor riil dalam 1-2 pekan ke depan. Rencananya, lanjutnya, pemerintah akan melakukan desain belanja negara secara baik agar APBN 2009 mampu menjadi stimulus bagi sektor riil.

"Fokus kita adalah bagaimana instrumen ini *to serve you all*. Jadi saya membuat instrumen ini memberi pelayanan secara efektif."

Menkeu menambahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mengkaji ulang desain anggaran proyek-proyek 2009. Namun, dipastikan tidak akan

ada proyek-proyek infrastruktur prioritas yang dibatalkan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Endin A.J. Soefihara menuturkan untuk menunjang kegiatan sektor riil dibutuhkan kebijakan khusus dan dukungan APBN sebagai stimulus. Pasalnya, sampai saat ini penyerapan belanja belum optimal dan berimplikasi negatif terhadap kebutuhan likuiditas sektor riil.

"Kebijakan Khusus itu perlu ada, tapi serapan APBN yang lebih tinggi juga harus diperhatikan," jelasnya usai rapat konsultasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia, kemarin.

Endin khawatir kinerja APBN-P 2008 yang kurang optimal menyebabkan menumpuknya dana pembangunan dan baru tersalurkan pada penghujung tahun ini. Dengan demikian, APBN-P 2008 tidak bisa memicu berkembangnya sektor riil.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan Departemen Perdagangan tengah membentuk satuan tugas (*task force*) terkait

dengan pengawasan atas perkembangan sektor riil yang sudah mulai terkena imbas, akibat krisis ekonomi global yang semakin bergejolak.

Rencananya Departemen Perdagangan akan melibatkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Departemen Pertanian dalam satuan tugas itu.

Untuk menjaga ekspor ke luar negeri, pemerintah telah menyiapkan tiga langkah. *Pertama*, meningkatkan daya saing dan memfasilitasi ekspor. *Kedua*, menjamin akses pasar ekspor tetap terbuka. *Ketiga*, melakukan negosiasi dan promosi yang efektif untuk mempertahankan pasar yang sudah ada ataupun melakukan diversifikasi pasar.

Pengampunan pajak

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) MS Hidayat mengusulkan agar pemerintah memberlakukan *tax amnesty* (pengampunan pajak) untuk mendorong investasi di Indonesia.

"Kalau dalam situasi seperti ini, *tax*

Rekomendasi kebijakan sektor riil

Rekomendasi utama:

Mengharapkan agar seluruh aturan yang diambil pemerintah harus sinkron dengan usulan yang diajukan Kadin dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor riil.

■ Kebijakan publik

Tidak ada perbedaan yang terlalu lebar antara aturan/prosedur formal sistem pembuatan kebijakan dan yang terjadi di lapangan.

■ Perpajakan

Pemberian stimulus fiskal seperti penurunan tarif dan lapisan tarif, pemberian fasilitas bebas PPN bagi produk primer tertentu serta fasilitas PPh untuk daerah dan produk tertentu.

■ Sistem fiskal dan moneter

Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan.

■ Kepabeanaan dan cukai

Peningkatan pelayanan kepabeanaan dan melakukan reformasi administrasi.

Sumber : Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal & Moneter, Kepabeanaan & Bea Cukai Kadin

BISNIS/FITRIYANA PULUNGAN

amnesty diberikan maka akan banyak dana dari luar negeri milik orang Indonesia yang akan kembali masuk dan itu bisa dimanfaatkan," katanya.

Menurut Hidayat, berbagai langkah reformasi di bidang perpajakan, bea dan cukai perlu dimantapkan secara berlanjut agar perekonomian Indonesia semakin efisien sehingga ekonomi biaya tinggi dapat ditekan.

Kadin juga mengusulkan agar produk pertanian primer tetap dibebaskan dari pengenaan pajak pertambah-

an nilai (PPN).

"Kami tetap mengusulkan untuk tetap memberlakukan PP No. 7/2007 yang membebaskan PPN untuk produk pertanian primer dengan pengecualian untuk industri kelapa sawit dan karet," jelas Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan, Sistem Fiskal & Moneter, Kepabeanaan & Bea cukai, Kadin, Hariyadi B. Sukamdani.

Anggota Komisi XI DPR Andi Rahmat menyatakan masalah likuiditas di dalam negeri di-

percaya akan dapat teratasi apabila pemerintah secepatnya memberlakukan *tax amnesty* terhadap investor Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri, sehingga aliran likuiditas akan masuk yang potensinya mencapai US\$250 miliar.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan penerimaan pajak tahun ini naik Rp25 triliun dari target penerimaan pajak dalam APBN-P 2008 sebesar Rp535 triliun menjadi Rp560 triliun. (15/16/17) (redaksi@bisnis.co.id)